

**PENGARUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI BAU-BAU
TERHADAP POLA HUNIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TOMBA DAN BATARAGURU KOTA BAU-BAU**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**TONY KARIM
L4D 008 068**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2010**

**PENGARUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI BAU-BAU
TERHADAP POLA HUNIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TOMBA DAN
BATARAGURU KOTA BAU-BAU**

Tesis ini diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:
TONY KARIM
L4D 008 068

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 29 Januari 2010

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Januari 2010

Tim Penguji,

Ir. Nurini, MT – Dosen Pembimbing
Ir. Nany Yulastuti, MSP – Dosen Penguji 1
DR. Ir. Robert J Kodoati, M.Eng - Dosen Penguji 2

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Sasaran yang Ingin Dicapai	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Lingkup Penelitian	6
1.6.1 Ruang Lingkup Materi Perumahan	6
1.6.2. Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.7. Kerangka Pikir Penelitian	11
1.8. Metodologi Penelitian	13
1.8.1 Pendekatan Penelitian	13
1.8.2 Metode Penelitian	13
1.8.3 Teknik Analisis	16
1.8.4 Teknik Sampling	18
1.9. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI POLA HUNIAN MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI	20
2.1. Pengertian	20
2.1.1 Rumah, Perumahan dan Permukiman	20
2.1.2. Sungai dan Bantaran Sungai.....	21
2.1.3. Penataan Lingkungan	21
2.2. Karakteristik Masyarakat	22
2.3. Perumahan Bagi Masyarakat	22
2.4. Pola Hunian Masyarakat	23
2.5. Pola Hunian Masyarakat di Kawasan Bantaran Sungai...	25
2.6. Pengaruh Lingkungan Hunian	26
2.6.1. Pengaruh Rendahnya Kualitas Hunian.....	26

2.6.2. Perbaikan Lingkungan Perumahan.....	28
2.6.3. Kepuasan Terhadap Lingkungan Hunian.....	39
2.7. <i>Lesson Learn</i> : Program <i>Slum Up Grading</i> di Bangbua Bangkok-Thailand.....	30
2.8. Sintesis Teori	32
BAB III	
TINJAUAN UMUM KOTA BAU-BAU DAN KAWASAN PERUMAHAN DIBANTARAN SUNGAI DI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU.....	37
3.1 Karakteristik Fisik Dasar	37
3.1.1 Letak Geografis	37
3.1.2. Topografi	39
3.1.3 Penggunaan Lahan	39
3.2. Kondisi Kependudukan	39
3.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	40
3.2.2. Struktur Umur dan Jenis Kelamin.....	40
3.3. Gambaran Kelurahan Tomba dan Bataraguru Serta Penataan Bantaran Sungai	41
3.3.1. Gambaran Kelurahan Tomba	41
3.3.2. Gambaran Kelurahan Bataraguru	43
3.3.3. Program Penataan Bantaran Sungai	44
3.3.3.1 PengerukanSungai Bau-Bau	45
3.3.3.2 Peningkatan Jalan Inspeksi	46
BAB IV	
ANALISIS PENGARUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI BAU-BAU TERHADAP POLA HUNIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU	50
4.1 Analisis Karakteristik Masyarakat di Kawasan Bantaran Sungai	50
4.1. 1 Kelompok Usia Masyarakat	51
4.1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	52
4.1.3. Mata Pencaharian Masyarakat	53
4.1.4. Tingkat Pendapatan Masyarakat	54
4.1.5. Lama Bermukim Masyarakat	55
4.1.6. Status Kependudukan Msyarakat	56
4.1.7. Sikap Budaya Masyarakat Setempat	57
4.2 Analisis Kegiatan Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau....	59
4.2.1 Pengerukan Sungai Bau-Bau	59
4.2.2. Peningkatan Jalan Inspeksi	60
4.3. Identifikasi dan Analisis Perubahan Pola Hunian Sesudah Penatan	63
4.3.1 Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan	63
4.3.2. Analisis Terhadap Arah Hadap Rumah	64
4.3.3 Analisis Terhadap Perubahan Fisik Rumah	67
4.3.4. Analisis Terhadap Perubahan Fungsi Rumah	70
4.4 Analisis Aktivitas Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penataan	72

4.4.1 Kebiasaan Membuang Sampah	72
4.4.2 Buangan Limbah Mandi, Cuci dan Kakus (MCK).....	77
4.4.3 Pemanfaatan Area Penataan Oleh Masyarakat.....	79
4.5. Temuan Penelitian	81
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dimana aspek pembangunan tersebut mencakup pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, rasa, aman, rasa keadilan dan lain-lain. Dalam prosesnya pembangunan terencana yang dilaksanakan secara bertahap, agar setiap tahapan memiliki kemampuan menopang pembangunan untuk tahap berikutnya. (Salim, 1993).

Masyarakat perkotaan keterlibatannya dalam pembangunan sering dihadapkan pada dilema ruang (tanah), baik ruang sebagai tempat aktivitas usaha, maupun ruang sebagai tempat permukiman mereka. Sejalan dengan kebutuhan akan ruang, maka aktivitas dari pemanfaatan ruang di suatu kota juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk sehingga ruang makin sempit dipertkotaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini membuat kapasitas kota dalam melayani masyarakatnya secara berimbang dan bertanggung jawab menjadi semakin terbatas. Permasalahan ruang tersebut, Budiharjo (2009:51) menyatakan bahwa pada saat penduduk belum bertambah dengan pesat, permasalahan perumahan bukanlah masalah yang merisaukan, dimana manusia masih dapat dengan leluasa membangun rumahnya karena lahan masih banyak tersedia, akan tetapi pada masa sekarang dimana perpindahan penduduk dari desa ke kota begitu tinggi mengakibatkan perumahan menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Perkembangan kawasan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduknya, baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota, maupun karena faktor urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena

didorong oleh tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan, pada saat kota sendiri belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Hal ini menyebabkan kota-kota sebagian besar dihuni oleh para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan dengan latar belakang kapasitas dan kemampuan yang sangat marjinal. Akibat penambahan penduduk yang semakin tidak terkendali dan didominasi oleh penduduk miskin, tidak dapat dielakkan kota pun menjadi kawasan yang padat dan kumuh karena harus menerima kaum urban sementara ketersediaan lahan bersifat stagnan, sehingga terjadi peningkatan intensitas ruang yang menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi, sekaligus ketidakteraturan ruang kota. Slums atau kekumuhan merupakan salah satu gejala yang timbul sebagai akibat dari fenomena tersebut.

Persoalan kekumuhan saat ini telah menjadi salah satu permasalahan yang cukup berat yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Namun kondisi tersebut diatas harus dapat disikapi dengan serius oleh pemerintah. Keterlambatan dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan akan membuat kawasan tersebut menjadi semakin luas dan akibatnya beban kota menjadi semakin berat. Salah satu penanganan permasalahan diatas adalah dengan melakukan penataan kembali kawasan permukiman penduduk sehingga dapat memperbaiki kualitas permukimannya menjadi lebih baik dan manusiawi.

Kota Bau-Bau sebagai kota yang relatif muda, terbentuk pada tahun 2001 merupakan salah satu kota yang sangat rentan terhadap pembentukan kawasan-kawasan kumuh di beberapa bagian wilayahnya. Hal tersebut relevan dengan struktur morfologi kotanya yang berbukit-bukit, sehingga terjadi aglomerasi penduduk di bagian wilayah Kota yang memiliki morfologi datar di sepanjang pesisir, sepanjang daerah Aliran Sungai, dan linier mengikuti jalan. Konsentrasi penduduk lebih terfokus lagi pada Bagian wilayah Kota dengan morfologi datar serta secara historis telah berperan sebagai Pusat pemerintahan dan perekonomian, yakni di Kecamatan Murhum dan Wolio.

Sungai Bau-Bau membelah pusat kota dan merupakan batas administrasi dua kecamatan yaitu Kecamatan Murhum dan Wolio. Di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bau-Bau telah lama tumbuh permukiman masyarakat. Adanya peristiwa bencana banjir besar pada tahun 1980-an yang disebabkan oleh meluapnya air

Sungai Bau-Bau sehingga menggenangi kawasan sekitarnya, membuat pemerintah Kabupaten Buton pada waktu itu melakukan upaya pencegahan dengan cara meninggikan bantaran sungai agar kejadian banjir besar tidak terulang lagi. Upaya tersebut membuat pembangunan perumahan pada kawasan tersebut tumbuh kembali. Pertumbuhan perumahan pada kawasan bantaran sungai berkembang dengan pesat.

Perkembangan perumahan di kawasan bantaran Sungai Bau-Bau tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Akibatnya pola hunian masyarakat pada kawasan bantaran Sungai Bau-Bau tumbuh secara tidak teratur. Pola arah hadap bangunan terhadap sungai belum jelas. Sebagian ada yang menghadap sungai namun sebagian lagi ada yang membelakangi sungai. Jarak antar rumah sangat dekat, bahkan atap rumahnya ada yang saling berhimpit. Banyaknya masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah membuat lingkungan bantaran sungai menjadi tidak nyaman.



Rumah masyarakat yang ada di depan Sungai Bau-Bau. Tampak perumahan yang ada cukup padat



Tampak rumah masyarakat saling berhimpit dan akses jalan yang ada sempit. Sangat berbahaya jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 1.1 POLA HUNIAN MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI BAU-BAU

Hasil pendataan dan pemetaan kawasan kumuh di Kota Bau-Bau pada tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bappeda dan Dinas Nakertrans Kota Bau-Bau memasukkan kawasan bantaran sungai yang ada di Kelurahan Tomba dan Bataraguru masuk dalam kategori kumuh. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi Pemerintah Kota terhadap pencapaian Visi Kota

Bau-Bau, yakni: *“Terwujudnya Kota Bau-Bau Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi dan Parawisata di Sulawesi Tenggara dengan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kota yang memadai serta adanya kehidupan masyarakat modern dengan tetap berlandaskan pada agama, adat dan budaya lokal”*. Penanganan kekumuhan, merupakan salah satu sasaran utama pemerintah Kota Bau- Bau dalam pencapaian Visi Kota, yang diejawantahkan pada Misi I, *Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kota Berbasis Water Front City*, khususnya pada sasaran ketiga yakni tersedianya kawasan permukiman baru yang layak huni, nyaman, aman serta indah.

Untuk memperbaiki kondisi lingkungan dikawasan bantaran sungai, maka pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan penataan pada kawasan tersebut. Program penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pengerukan Sungai Bau-Bau dan peningkatan Jalan Inspeksi. Dengan adanya penataan kawasan bantaran sungai, maka diharapkan akan membuat lingkungan hunian masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah Kota juga mengharapkan dengan tertatanya kawasan bantaran sungai tersebut, maka akan membuat masyarakat menjadikan sungai sebagai halaman depan rumahnya dan dengan sendirinya akan berupaya memperbaiki huniannya menjadi lebih baik.

Hingga saat ini kegiatan penataan kawasan bantaran sungai Bau-Bau masih terus berlangsung. Salah satu kegiatan penataan yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah pemasangan jaringan lampu jalan di kawasan tersebut. Namun kegiatan pengerukan sungai dan peningkatan jalan inspeksi telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2007. Untuk itu penelitian ini bermaksud melihat pengaruh penataan bantaran sungai pasca pengerukan sungai dan peningkatan jalan inspeksi terhadap pola hunian masyarakat

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan perumahan di kawasan bantaran sungai belum tertata dengan baik. Sungai belum dijadikan sebagai bagian depan rumah masyarakat. Hal ini disebabkan perilaku masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di bantaran atau di badan sungai sehingga lingkungan sekitar bantaran sungai menjadi tidak nyaman.

Setelah diadakannya penataan bantaran sungai dengan kegiatan pengerukan sungai serta peningkatan jalan inspeksi diharapkan ada perubahan kondisi lingkungan. Hingga saat ini kegiatan penataan tersebut masih berlangsung dengan program pemasangan lampu penerang jalan di sekitar bantaran sungai. Namun kegiatan pengerukan sungai dan peningkatan jalan inspeksi di daerah bantaran sungai telah selesai dilaksanakan pada tahun 2007 lalu.

Melihat rumusan permasalahan diatas, maka penulis mengangkat sebuah pertanyaan penelitian (*Research Question*) yaitu: ***Bagaimana pengaruh penataan bantaran Sungai Bau-Bau terhadap pola hunian masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara***”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penataan bantaran Sungai Bau-Bau terhadap pola hunian masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini akan melihat pengaruh pasca peningkatan jalan inspeksi di tahun 2007 terhadap pola hunian masyarakat yang ada di kawasan tersebut.

1.4 Sasaran yang ingin dicapai

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka terlebih dahulu ditetapkan sasaran penelitian. Adapun sasaran penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru.
2. Menganalisis kegiatan penataan bantaran Sungai Bau-Bau.
3. Mengidentifikasi dan analisis perubahan pola hunian sesudah adanya kegiatan penataan bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru
4. Menganalisis perubahan aktivitas masyarakat sebelum dan sesudah penataan bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka penataan kawasan bantaran Sungai Bau-Bau
2. Bagi perencana, pengelola dan penentu kebijakan Pembangunan Kota, menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan tentang perumahan di sekitar bantaran Sungai Bau-Bau.
3. Dapat dipakai sebagai dasar studi lanjutan bagi peneliti lain yang berminat menyoroti permasalahan pembangunan perumahan di sekitar bantaran sungai.

1.6 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah, sedangkan ruang lingkup spasial berusaha membatasi ruang lingkup wilayah kajian.

1.6.1 Ruang Lingkup Materi Perumahan

Ruang lingkup materi akan membahas aspek-aspek yang dikaji pada penelitian dan dibatasi pada aspek fisik rumah, aspek ekonomi masyarakat, aspek sosial dan budaya masyarakat, yaitu:

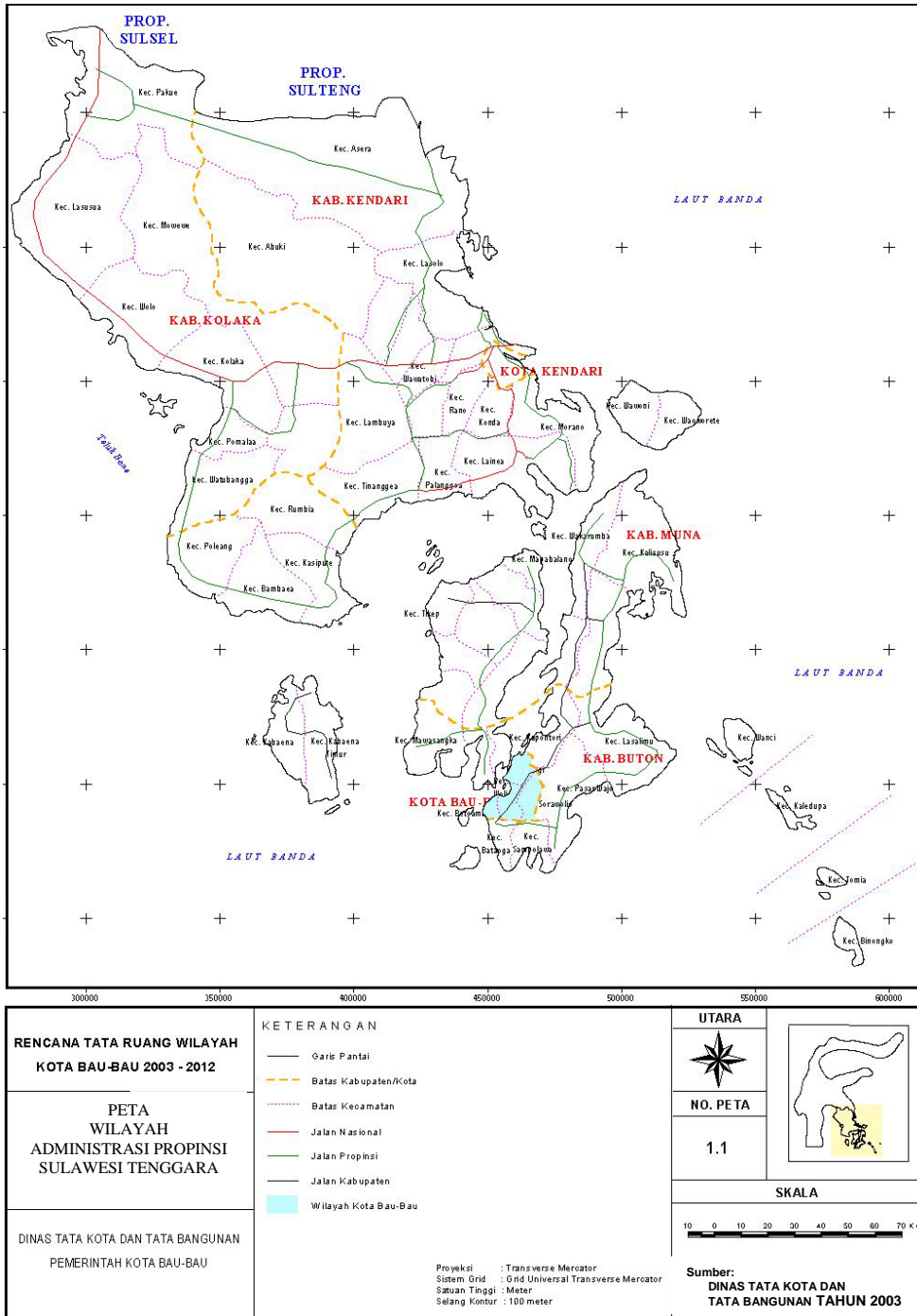
1. Menganalisis karakteristik masyarakat yang bermukim disekitar kawasan bantaran sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Lingkup materinya adalah:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat
 - b. Mata pencaharian masyarakat.
 - c. Tingkat pendapatan masyarakat.
2. Menganalisis kegiatan penataan bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Lingkup materinya adalah:
 - a. Program pengerukan/normalisasi sungai Bau-Bau
 - b. Kegiatan peningkatan Jalan inspeksi di Kelurahan Tomba dan Bataraguru

3. Mengidentifikasi dan analisis perubahan pola hunian sesudah adanya kegiatan penataan bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Lingkup materinya adalah:
 - a. Perubahan terhadap arah hadap rumah terhadap sungai setelah adanya penataan bantaran sungai
 - b. Perubahan fisik rumah setelah adanya penataan bantaran sungai
 - c. Perubahan fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal setelah adanya penataan bantaran sungai.
4. Menganalisis perubahan aktivitas masyarakat sebelum dan sesudah penataan bantaran sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Lingkup materinya adalah:
 - a. Kebiasaan membuang sampah masyarakat
 - b. Buangan limbah MCK masyarakat
 - c. Pemanfaatan area penataan oleh masyarakat.
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

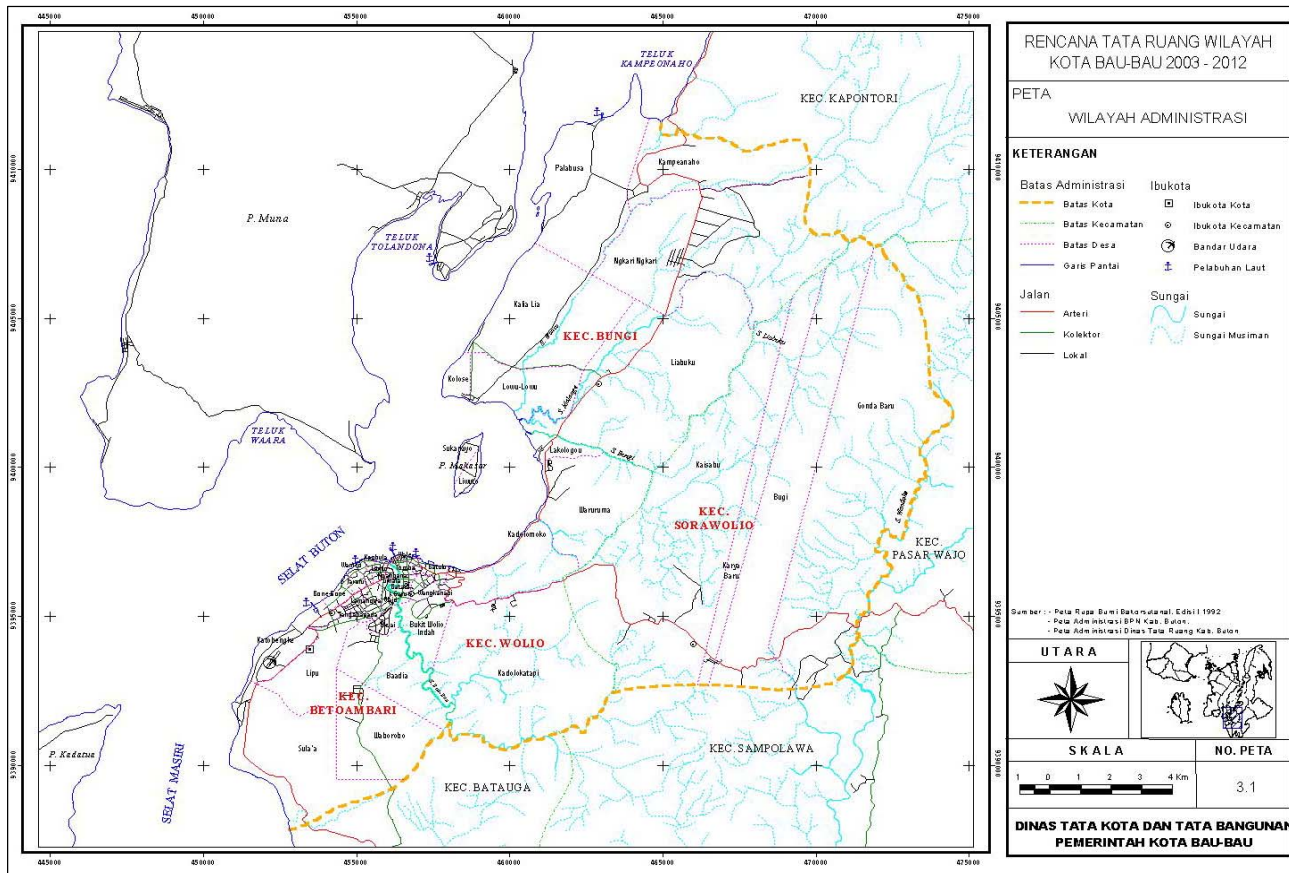
Program penataan bantaran sungai yang dilaksanakan oleh pemerintah Bau-Bau yang bertujuan meningkatkan kualitas kawasan tersebut dan diharapkan akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Pembuatan akses jalan yang cukup lebar di kawasan bantaran Sungai Bau-Bau membuat perumahan masyarakat menjadi lebih mudah terjangkau.

Ruang lingkup wilayah dibatasi pada kawasan perumahan yang ada di bantaran Sungai Bau-Bau di Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah menikmati program penataan bantaran sungai tersebut. Sebelum adanya penataan, kondisi jalan inspeksi yang ada di bantaran sungai sangat memprihatinkan dan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Adanya kegiatan penataan bantaran sungai yang salah satu program kegiatannya adalah peningkatan jalan inspeksi dan telah selesai di kerjakan pada tahun 2007, maka aksesibilitas pada kawasan tersebut menjadi lebih baik. Maka fokus penelitian ini adalah perumahan masyarakat yang berada di dekat bantaran sungai yang akan merasakan langsung program penataan tersebut.



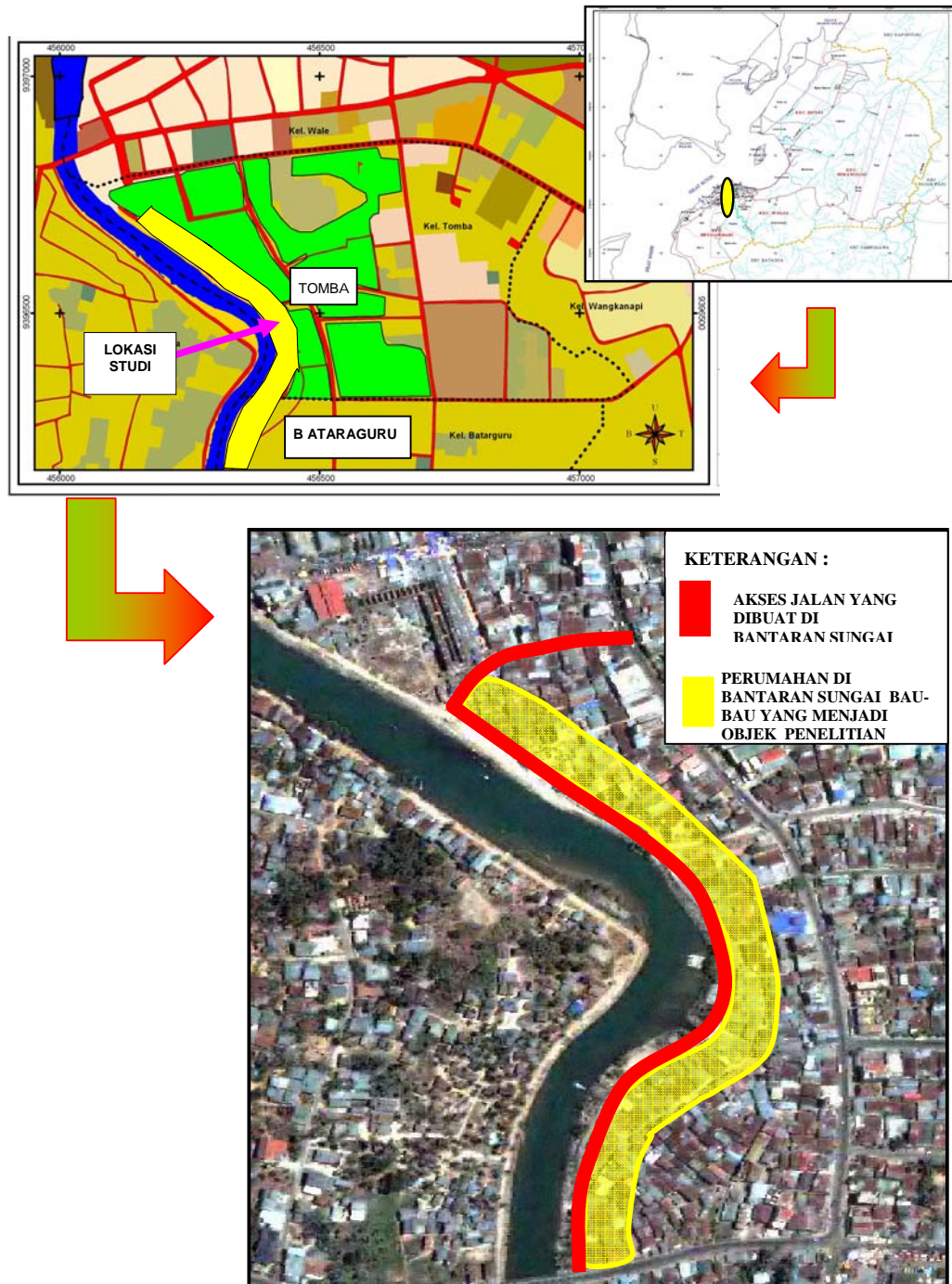
Sumber : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, 2003

GAMBAR 1.2
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA



Sumber : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Bau-Bau, 2003

GAMBAR 1.3
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BAU-BAU



Sumber: Quickbird Kota Bau-Bau Tahun 2006, diolah

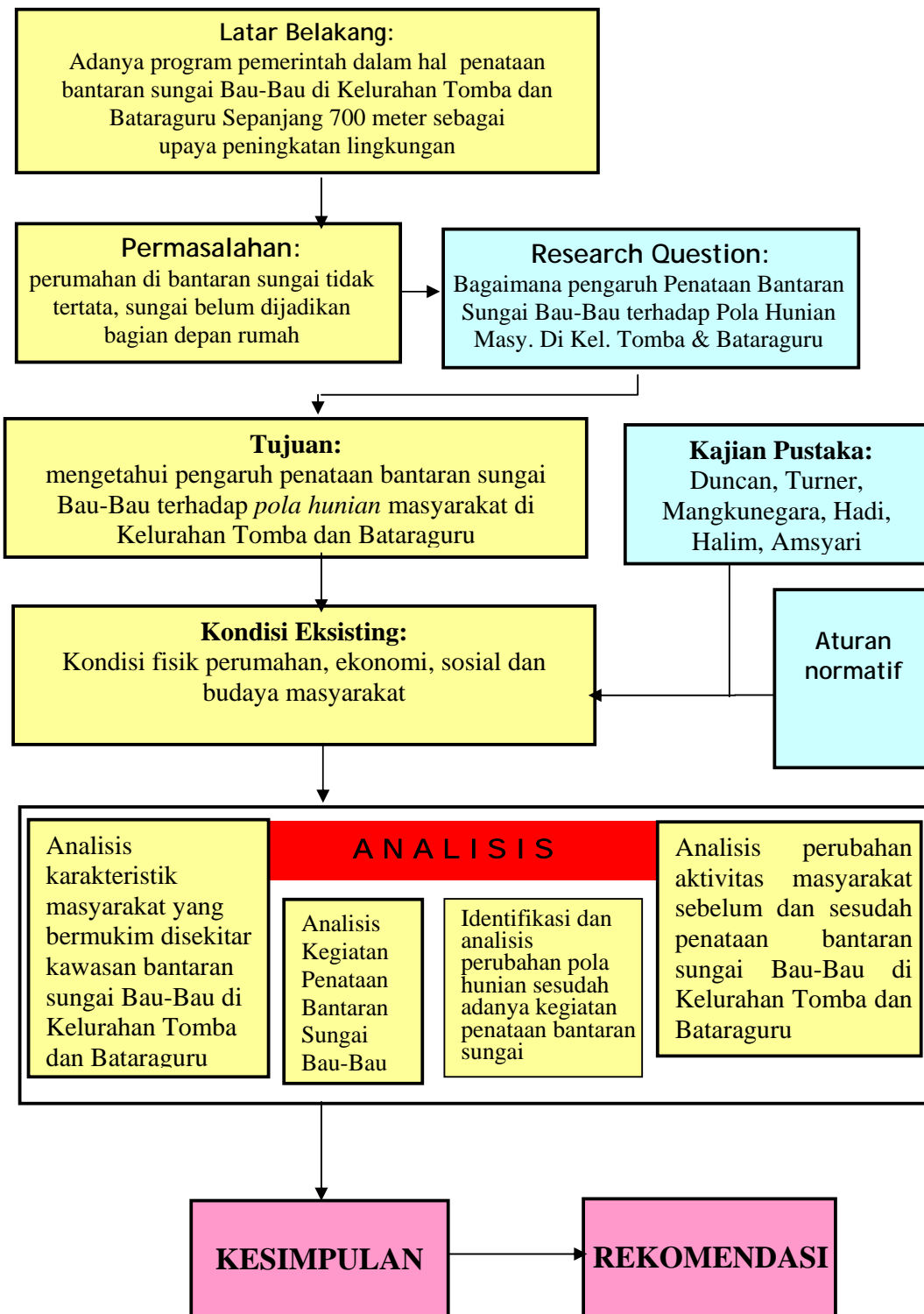
GAMBAR 1.4
LOKASI PENELITIAN DI DAERAH BANTARAN SUNGAI
BAU-BAU DI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU
DAN POSISINYA DALAM KOTA BAU-BAU

1.7. Kerangka Pikir Penelitian

Perumahan yang ada disekitar kawasan bantaran Sungai Bau-Bau telah lama tumbuh dan berkembang. Namun karena lemahnya kontrol dari pemerintah sehingga perumahan tersebut berkembang tanpa penataan yang baik. Minimnya penyediaan prasarana pada kawasan tersebut dan perilaku masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya ke sungai, membuat kawasan tersebut cenderung kumuh.

Adanya permasalahan tersebut diatas, maka diadakan penataan bantaran sungai yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat pada kawasan tersebut. Program tersebut dimulai pada tahun 2006 dengan kegiatan pengerukan sungai untuk mengurangi sedimen yang telah lama terbentuk. Pada tahun 2007 pemerintah membuka akses jalan dibantaran sungai selebar 6 meter, disamping untuk jalan bagi masyarakat juga untuk membatasi perumahan masyarakat agar tidak berkembang kearah sempadan sungai.

Analisis karakteristik perumahan dan masyarakat yang ada dikawasan bantaran sungai Bau-Bau tersebut bertujuan untuk mengetahui kecenderungan membangun hunian dan perlakuan terhadap sungai setelah adanya penataan tersebut.



Sumber: Peneliti, 2010

GAMBAR 1.5
KERANGKA PIKIR

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini akan dibahas pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu positivistik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisa data yang didapat adalah statistik deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilokasi studi adalah teknik probability sampling dengan cara random sampling.

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian pengaruh penataan bantaran Sungai Bau-Bau terhadap pola hunian masyarakat adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Paradigma ini menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan memandang pengetahuan memiliki kesamaan sehubungan dengan pandangan aliran filsafat yang dikenal dengan positivisme. Metode kuantitatif merupakan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2009;7). memandang semua ilmu pengetahuan yang benar (ilmu-ilmu manusia maupun alam) harus berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipaparkan secara panjang lebar dan prediktif. Menurut Comte (dalam Unaradjan, 2003;30), masyarakat perlu disusun menurut pengetahuan ilmiah atau fakta positif, seperti etika, politik, pendidikan dan ekonomi (semestinya semua merupakan cabang ilmu-ilmu positif).

1.8.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh penataan bantaran sungai Bau-Bau terhadap pola hunian masyarakat akan digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini (modul, 2009). Metode ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini dapat juga digunakan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual atau kelompok tertentu secara akurat.

Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nasir, 2005: 174). Kebutuhan data primer akan diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden dengan menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu baik pertanyaan tertutup maupun terbuka. Data yang di ambil adalah data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian pengaruh penataan bantaran sungai terhadap pola hunian masyarakat. Responden adalah warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan juga media elektronik seperti internet berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan.

Semua orang dapat mencari data dalam suatu kegiatan penelitian, tetapi tidak semua orang mampu memilih data yang relevan dengan topik penelitian, melakukan pembahasan, menganalisis, yang akhirnya mampu membuat kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis. Salah satu rumus yang penting dalam penelitian adalah mencari data. (Sukandarrumidi, 2004;69).

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi.

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek dilapangan dan melakukan pengambilan gambar berupa foto yang dianggap akan mendukung kegiatan penelitian ini. Objek amatan pada lokasi studi antara lain; kondisi fisik rumah masyarakat, arah hadap rumah terhadap sungai serta perilaku masyarakat dalam membuang sampah.

b. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yaitu Kepala Keluarga yang tinggal di lokasi studi, untuk dijawab pula secara tertulis oleh responden.

Sedangkan data yang terkait dengan penelitian ini disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini:

TABEL I.1
KERANGKA ACUAN DATA PENELITIAN

SASARAN	VARIABEL	DATA	BENTUK DATA	SUMBER DATA	PARAMETER
FISIK	<ul style="list-style-type: none"> - Arah hadap rumah terhadap sungai - Kondisi Fisik rumah - Fungsi rumah - Pembangunan fisik lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rumah yang menghadap sungai - Jumlah yang di renovasi - Perubahan fungsi rumah - Status rumah - Program penataan - Peta kelurahan & quickbird 	<ul style="list-style-type: none"> Kuesioner & Observasi Kuesioner & Observasi Kuesioner Data Sekunder Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian Dinas PU Bappeda, tata kota 	<ul style="list-style-type: none"> jumlah rumah yang menghadap sungai, jumlah rumah yang mengalami perbaikan, jumlah rumah yang mengalami perubahan fungsi,
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan - Mata Pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pendapatan - Jumlah pengeluaran - Jenis pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kuesioner Kuesioner Kuesioner 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penghasilan dan jenis pekerjaan
SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan - Lama bermukim - Kebiasaan membuang sampah - Kegiatan waktu luang - Kebiasaan MCK 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk - Pendidikan - Status penduduk - Lama bermukim - Lokasi buang sampah - Jumlah TPS - Buangan MCK - Keg.waktu luang 	<ul style="list-style-type: none"> Data sekunder kuesioner kuesioner kuesioner dan observasi Observasi Kuesioner dan observasi Kuesioner dan observasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Tomba dan Bataraguru Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian Lokasi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk, status penduduk, lama bermukim, aktivitas masyarakat

Lanjut.....

Lanjutan

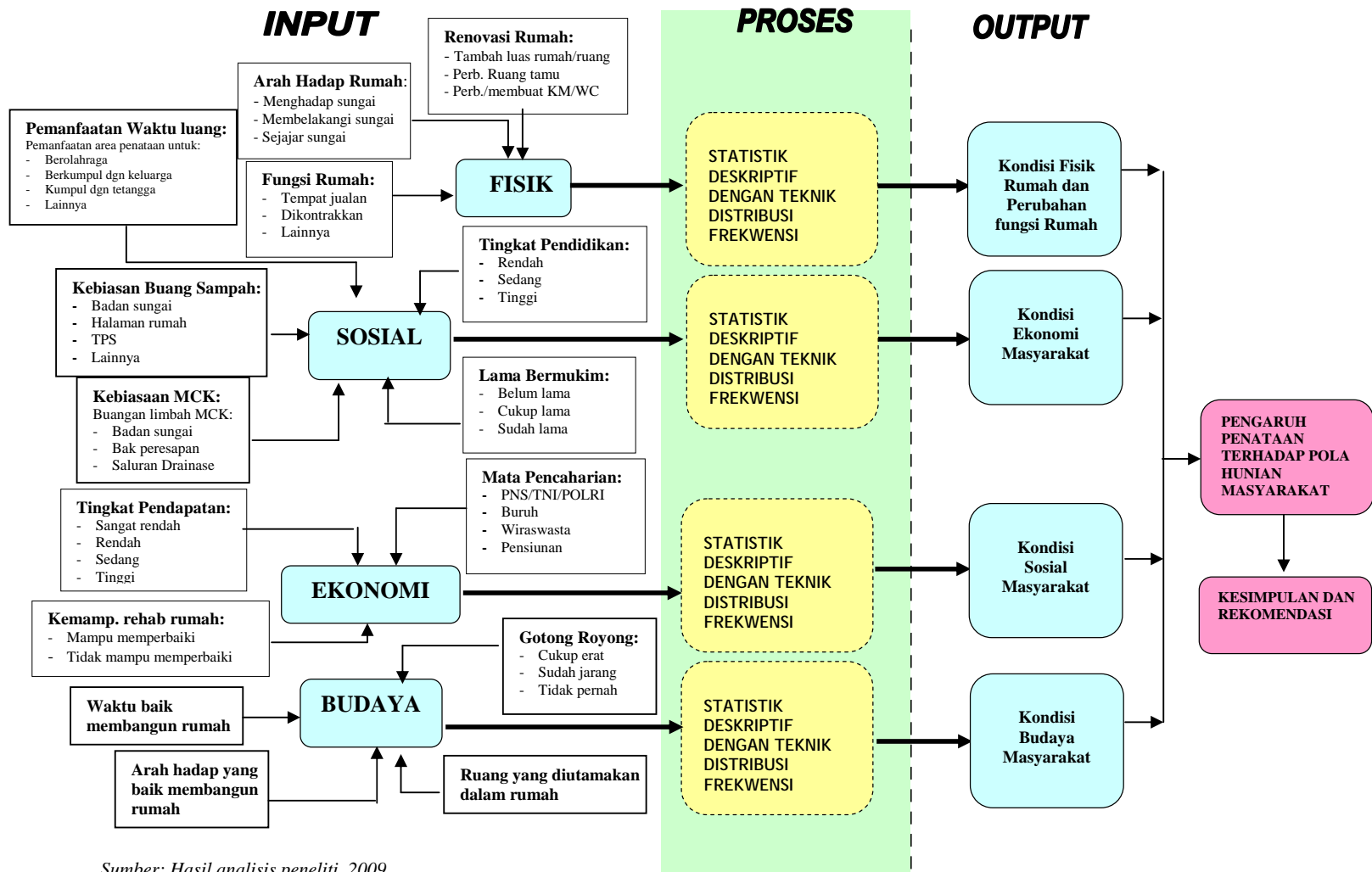
SASARAN	VARIABEL	DATA	BENTUK DATA	SUMBER DATA	PARAMETER
BUDAYA	- Gotong royong	Jumlah msyarakat yang masih mau gotong royong	Kuesioner	Lokasi penelitian	intensitas gotong royong, waktu dan arah hadap yang baik dalam membangun.
	- Kebiasaan dalam mencari waktu membangun rumah	Jumlah masyarakat yang percaya terhadap arah hadap mencari waktu yang baik dalam membangun rumah	Kuesioner	Lokasi penelitian	Ruang yang paling mendapat perhatian dalam membangun rumah
	- Kepercayaan terhadap arah hadap membangun rumah	Jumlah masyarakat yang percaya terhadap arah hadap dalam membangun rumah	Kuesioner	Lokasi penelitian	
	- kepercayaan dalam mengutamakan ruang tertentu didalam rumah	Jumlah masyarakat yang percaya terhadap mengutamakan ruang tertentu didalam rumah	Kuesioner	Lokasi penelitian	

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2009

1.8.3 Teknik Analisis

Data yang terkumpul di lapangan merupakan data mentah. Untuk dapat digunakan atau mempunyai arti data tersebut harus diolah terlebih dahulu. Dalam penelitian ini alat yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah analisis statistik. Hasil analisis ini dapat tersaji dalam bentuk tabel atau grafik.

Untuk memudahkan pemahaman proses pengolahan data tersebut dapat dilihat kerangka analisis pada Gambar 1.6. Kerangka analisis dibuat dengan tujuan untuk mengorganisasikan, mengelompokkan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sesuai dengan kebutuhan. Proses mengelola data akan dijadikan informasi untuk mencapai tujuan penelitian.



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2009

GAMBAR 1.6
KERANGKA ANALISIS

1.8.4 Teknik *Sampling*

Teknik untuk pengambilan sampel digunakan teknik Probability sampling (pengambilan sampling berdasarkan peluang) dengan cara *Random Sampling* (teknik acak sederhana). Semua anggota masyarakat akan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini dapat dilakukan karena populasi masyarakat pada kawasan bantaran Sungai Bau-Bau relatif homogen.

Karena besarnya jumlah populasi masyarakat, maka tidak semua responden dijadikan sampel. Banyaknya jumlah sampel dihitung dengan rumus (Riduwan, 2008: 65):

$$n = N/(1 + Nd^2)$$

Dengan ketentuan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi,

d = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir.

Nilai d diambil = 10%, dengan pertimbangan karena penelitian ini tidak membahayakan nyawa manusia serta keterbatasan waktu serta biaya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam metode pengambilan sampel adalah penelitian harus memperhatikan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu. (Singarimbun, 2006:150).

Ukuran populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK). Jumlah kepala keluarga yang mendiami kawasan bantaran sungai Bau-Bau sebanyak 184 KK. Sebanyak 102 KK masuk dalam wilayah Kelurahan Tomba dan 82 KK berada pada wilayah Kelurahan Bataraguru. Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sesuai rumus diatas adalah:

$$\begin{aligned} n &= N/(1 + Nd^2) \\ &= 184 / [1 + 184 \times (0,1)^2] \\ &= 64,79 \approx 65 \text{ KK} \end{aligned}$$

Sedangkan penyebarannya pada kedua kelurahan tersebut dilakukan perbandingan yang proporsional, yaitu:

Kelurahan Tomba sebanyak $= 102 / 184 \times 65 = 36,03 \approx 36$ kuesioner
 Kelurahan Bataraguru sebanyak $= 82 / 184 \times 65 = 28,96 \approx 29$ kuesioner

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup dan batasan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan
- BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG POLA HUNIAN MASYARAKAT**
 Bab ini mencakup uraian tentang tinjauan teoritis dari berbagai literatur yang bertujuan untuk memahami pola hunian masyarakat, serta pengaruh lingkungan hunian terhadap masyarakat.
- BAB III : TINJAUAN UMUM KOTA BAU-BAU**
 Bab ini menggambarkan kondisi umum Kota Bau-Bau serta gambaran umum lokasi studi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk analisis
- BAB IV : ANALISIS PENGARUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI BAU-BAU TERHADAP POLA HUNIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU**
 Bab ini menganalisis perubahan pola hadap rumah terhadap sungai, perubahan fungsi rumah serta menganalisis aktivitas masyarakat sebelum dan sesudah adanya program penataan bantaran sungai Bau-Bau
- BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
 Bab ini menyimpulkan hasil analisis pengaruh penataan bantaran sungai terhadap pola hunian masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta memberikan rekomendasi terhadap temuan-temuan yang didapat dalam penelitian ini

BAB II

KAJIAN TEORI POLA HUNIAN MASYARAKAT DIBANTARAN SUNGAI

Penulisan ilmiah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, maka kajian teori merupakan landasan dalam menganalisis data lapangan untuk mencapai tujuan dari penulisan. Pendapat para pakar dan aturan normatif yang relevan dengan tema penulisan harus kuat untuk mendukung hasil penulisan nantinya.

Dalam bab ini, akan dijelaskan pendapat para pakar dan aturan normatif yang berkenaan dengan pengertian tentang rumah, sungai, bantaran sungai serta penataan lingkungan. Setelah itu juga akan dijelaskan tentang pola masyarakat perkotaan dan dibantaran sungai serta pengaruh dari lingkungan hunian bagi masyarakat sekitar. Serta ada juga lesson learn tentang program penataan kawasan bantaran kanal di Bangbua, Bangkok-Thailand yang berkenaan dengan tema penelitian ini. Pada sub bab terakhir akan dibuat sintesa teori berdasarkan teori yang telah didapatkan dari kajian literatur.

2.1 Pengertian

Dalam sub bab ini akan dijelaskan pengertian mengenai rumah, perumahan dan permukiman, sungai dan bantaran sungai dan penataan lingkungan berdasarkan pendapat para ahli atau berdasarkan aturan normatif yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti.

2.1.1 Rumah, Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman dikatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Rumah memiliki makna dan menjadi identitas hidup individu yang mampu menyatakan status dan membentuk hubungan sosial (Duncan dalam Halim,2008:22). Rumah jika dipandang secara luas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja namun juga mempunyai fungsi lain. Turner (1972) mengidentifikasi 3 fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat bermukim, yaitu:

1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga. Hal ini diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.
2. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi dengan fungsi pengembangan keluarga.
3. Rumah sebagai penunjang rasa aman dengan jaminan keamanan atas lingkungan dan kepemilikan.

2.1.2 Sungai dan Bantaran Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai dikatakan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Sedangkan bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

2.1.3 Penataan Lingkungan

Pembangunan dalam kaitannya dengan penataan adalah berbagai jenis kegiatan, baik yang mencakup sektor pemerintah maupun masyarakat dan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat (Santosa, 2000). Usaha tersebut pada dasarnya untuk memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan. Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan khususnya bidang perumahan adalah masalah pemerataan. Disatu

sisi terdapat kawasan perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sehingga membuat para penghuni merasa nyaman. Sedangkan disisi yang lain terdapat kawasan perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana yang sangat minim dengan kepadatan perumahan yang cukup tinggi dan kualitas lingkungannya yang buruk.

Penataan Lingkungan/Kawasan adalah suatu usaha untuk memperbaiki, mengubah, mengatur kembali lingkungan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang secara optimal. Adanya penurunan fungsi suatu lingkungan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal untuk mengembalikan fungsi tersebut perlu dilakukan penataan.

2.2 Karakteristik Masyarakat

Masyarakat dapat dikelompokkan dalam berbagai kelompok sesuai dengan ciri-ciri tertentu, seperti tingkat kepandaian, tingkat pendapatan, tingkat hubungan kekerabatan, tingkat usia dan sebagainya (Soekanto dalam Hariyono,2007). Kebiasaan-kebiasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan pelapisan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat perbedaan status sosial. Kedudukan status sosial seseorang dapat dilihat dari peranannya dalam masyarakat. Makin tinggi peranan seseorang dalam masyarakat maka status sosialnya akan semakin tinggi pula.

Karakteristik kelas masyarakat dapat identifikasi berdasarkan sifat konsumsifnya yaitu masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah: (Mangkunegara dalam Hariyono, 2007). Ciri dari masyarakat kelas atas adalah mereka tidak lagi khawatir akan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dan sifat konsumtifnya berdasarkan kualitas. Sedang untuk masyarakat kelas bawah adalah mereka masih khawatir dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya dan sifat konsumtifnya adalah kuantitas.

2.3. Perumahan Bagi Masyarakat

Kebutuhan manusia berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi paling tidak sebuah rumah akan selalu diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan perlindungan (Soebroto, Budihardjo(ed),2009:50). Jika kebutuhan akan rumah tidak terpenuhi maka penghuni akan timbul perasaan

tidak betah. Bagaimanapun segala aktivitas masyarakat berawal dari rumah. Manusia mempergunakan rumah sebagai proses sosialisasi dan nilai-nilai budaya.

Dalam pengadaan perumahan, sangat diperlukan peran serta masyarakat karena pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendorong dan memberi bantuan untuk mencapai tujuan. Pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab dari masyarakat sendiri sehingga potensi dan peran serta masyarakat perlu dikembangkan dalam pembangunan perumahan. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk berperan serta yang sebesar-besarnya dalam pembangunan rumah, perumahan dan lingkungan permukiman meliputi pemugaran, renovasi, peremajaan lingkungan permukiman dan pembangunan perumahan sebagaimana dinyatakan dalam UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan/atau masyarakat sekitar dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan permukiman serta persyaratan rumah sendiri, sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. (Sanropie dalam Keman, 2005).

2.4. Pola Hunian Masyarakat

Arahan pembangunan perumahan yang tertuang dalam GBHN 1993 mengamanatkan konsep pola hunian 1:3:6. Artinya, dalam membangun sebuah proyek hunian berskala kota dalam satu lokasi, yaitu membangun fasilitas hunian dengan perbandingan satu rumah mewah, tiga rumah menengah dan enam rumah sederhana (RS) dan sangat sederhana (RSS), (Sastra dan Endy Marlina, 2006:25). Menurut Al Anindito Pratomo, (Kompas: senin, 12 Oktober 2009) bahwa pola hunian desa adat Penglipuran Bali masih mencerminkan sebuah bangunan arsitek tradisional. Pintu gerbang khas Bali atau yang disebut *angkul* yang merupakan

akses menuju rumah penduduk yang berada pada setiap pekarangan terlihat seragam satu sama lain. Setiap bangunan yang ada di masing-masing pekarangan ditata dengan rapi. Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pola hunian adalah suatu cerminan bentuk fisik rumah dan lingkungan disekitarnya pada suatu kawasan perumahan.

Menurut Suparno Sastra dan Endy Marlina (2005:120) bahwa dalam merencanakan tempat tinggal ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Aspek Lingkungan. Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan rumah karena lingkungan adalah tempat berdirinya rumah. Yang termasuk aspek lingkungan antara lain lokasi tempat tinggal, kepastian hukum lahan dan *building coverage* bangunan.
2. Keadaan iklim setempat. Kenyamanan iklim ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya temperatur udara, kelembaban, peredaran udara dan radiasi panas.
3. Orientasi tanah setempat. Orientasi tanah setempat ini meliputi orientasi persil tanah yang akan berpengaruh terhadap arah hadap bangunan, orientasi bangunan terhadap sinar matahari, orientasi terhadap aliran udara dan pengaturan terhadap jarak bangunan.
4. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi ini meliputi pola pikir, agama yang dianut, karakter masyarakat setempat.
5. Aspek kesehatan. Beberapa hal yang terkait dengan masalah kesehatan dalam perencanaan bangunan adalah: kecukupan air bersih, kecukupan cahaya dan kecukupan udara.
6. Aspek teknis. Aspek teknis suatu bangunan harus memenuhi persyaratan kekuatan bangunan.

Sedangkan bentuk hunian secara garis besarnya dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu:

1. Rumah yang didiami dengan jumlah keluarga banyak (*multi family housing*). Bentuk bangunannya pada umumnya dibangun vertikal. Contohnya: apartemen, rusun dan rusunawa.

2. Rumah yang dihuni oleh satu keluarga (*single family housing*). Rumah dengan tipe ini ada beberapa bentuk:
 - Rumah tunggal. Rumah dimana bangunan induk tidak berimpitan dengan bangunan lain.
 - Rumah gandeng dua (kopel). Rumah dimana sisi bangunannya berhimpitan dengan bangunan tetangganya pada bagian rumah induk.
 - Rumah gandeng banyak. Rumah dimana satu atau lebih bangunan saling berhimpitan satu sama lain dengan jumlah lebih dari dua bangunan.

2.5. Pola Hunian Masyarakat di Kawasan Bantaran Sungai

Pada umumnya masyarakat memandang sungai sebagai tempat buangan. Masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat buangan barang-barang yang tidak berguna, tempat berak, termasuk membuang bangkai binatang. Karena itulah maka rumah-rumah penduduk pada umumnya letaknya membelakangi sungai. (Hadi dalam Yuwono, dkk (ed), 2003:76).

Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum bahwa sebagian kota-kota besar di Indonesia tumbuh dan berkembang berawal dari bantaran sungai, seperti Jakarta, Surabaya dan Palembang. Seperti juga permukiman di perkotaan, pertumbuhan penduduk yang cepat di kawasan bantaran sungai sedangkan kapasitas ruang yang terbatas akan menimbulkan permasalahan, seperti (Syafri, 2007:57):

2. Pertumbuhan penduduk yang cepat sedangkan ketersediaan ruang terbatas membuat kepadatan perumahan menjadi tinggi sehingga akan menciptakan kekumuhan pada kawasan tersebut.
3. Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai dan sempadan sungi sebagai tempat hunian disamping melanggar aturan perundangan juga akan mengurangi debit air sungai sehingga potensi banjir semakin besar.
4. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan hunian dan menyediakan prasarana yang memadai.
5. Perumahan penduduk yang tidak tertata dan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan kotoran akan menyebabkan menurunnya kualitas air dan terbentuknya sedimentasi dengan cepat pada sungai.

Secara umum, karakteristik masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran sungai khususnya di daerah perkotaan adalah:

1. Perumahannya tidak tertata dengan baik
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.
3. Sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor informal.
4. Tingkat pendapatan rendah
5. Tingkat pendidikan rendah.

2.6. Pengaruh Lingkungan Hunian

Lingkungan hunian memberikan pengaruh yang besar terhadap penghuni. Kualitas lingkungan hunian yang kurang baik berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Disamping itu akan membuat masyarakat yang tinggal tidak merasa nyaman. Untuk itu perlu ada perbaikan terhadap lingkungan yang kurang baik sehingga akan membuat nyaman masyarakat yang tinggal dikawasan itu.

2.6.1. Pengaruh Rendahnya Kualitas Lingkungan

Lingkungan rumah merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap status kesehatan penghuninya (Notoatmodjo, 2003). Lingkungan perumahan yang tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Rendahnya kualitas lingkungan tersebut dapat disebabkan oleh sistem sanitasi yang kurang baik, tidak adanya tempat buangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan, ataupun kepadatan hunian yang cukup tinggi.

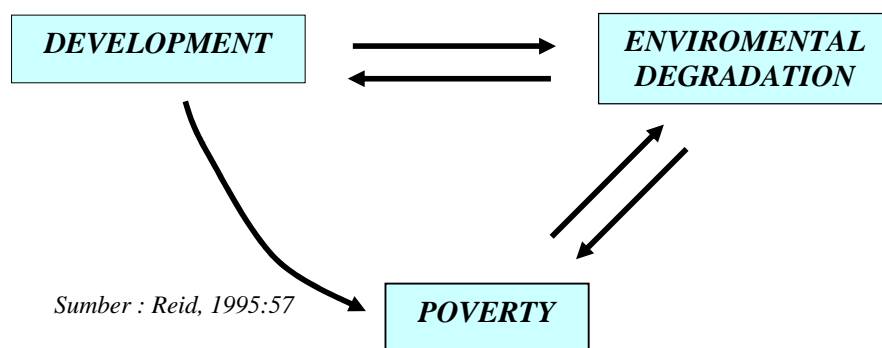
Permasalahan lingkungan yang buruk biasanya terjadi di daerah yang tingkat urbanisasi dan industrialisasinya tinggi serta adanya eksplorasi sumber daya alam. Secara umum adanya ketergantungan ekonomi dan teknologi dari negara maju dalam memacu industrialisasi, ditambah dengan tujuan pembangunan pada pertumbuhan, merupakan pendorong utama terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia. (UNDP, 1992).

Kebijakan penanganan permukiman kumuh sesuai Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun 1993, dinyatakan bahwa perumahan dan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni yang keadaannya tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan

kenyamanan serta tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif yang penanganannya dilaksanakan melalui pola perbaikan/pemugaran, peremajaan maupun relokasi sesuai dengan tingkat/kondisi permasalahan yang ada. Perumahan dilingkungan kumuh cenderung tidak layak huni dan terkadang tidak manusiawi dan belum memenuhi standar yang baik ditinjau dari berbagai aspek. Kekumuhan tersebut bisa terjadi karena adanya urbanisasi, bisa karena adanya invasi masyarakat pada tanah negara atau tanah yang dianggap tidak bertuan. Permukiman kumuh mempunyai kepadatan yang relatif tinggi, tidak mempunyai jaringan struktur pelayanan yang teratur, serta prasarana permukiman minim.

Rendahnya kualitas kehidupan di lingkungan permukiman kumuh ini pada gilirannya juga menghambat potensi produktivitas dan kewirausahaan para penghuninya. Pada umumnya mereka kemudian hanya mampu mengakses perekonomian informal kota, yang utamanya dicirikan oleh status hukum yang lemah dan tingkat penghasilannya yang rendah (Salim, 1993).

Lingkungan hidup mempunyai daya dukung tertentu terhadap eksploitasi dan mengakomodasi kegiatan manusia yang merubah lingkungan hidup. Jika pembangunan yang dilakukan melampaui daya dukung lingkungannya maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan menghambat pembangunan selanjutnya. Reid menggambarkan keterkaitan antara pembangunan, penurunan kualitas lingkungan dan kemiskinan.



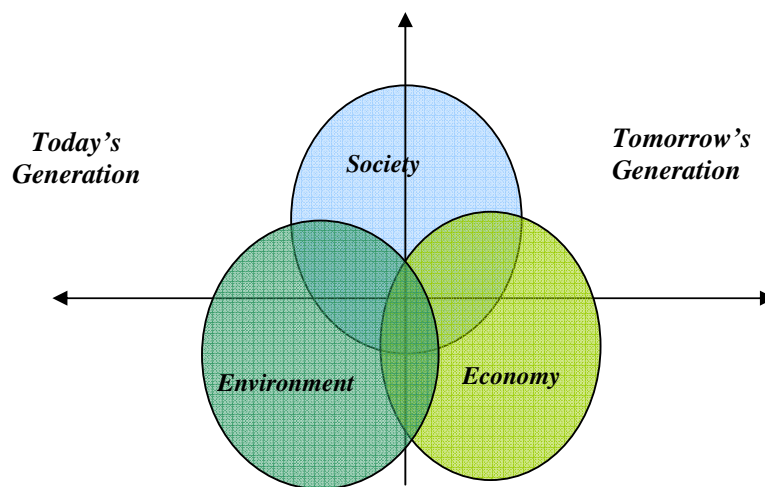
GAMBAR 2.1
KETERKAITAN PEMBANGUNAN, PENURUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEMISKINAN

2.6.2 Perbaikan Lingkungan Perumahan

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dimana aspek pembangunan tersebut mencakup pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, rasa, aman, rasa keadilan dan lain-lain. Dalam prosesnya pembangunan terencana yang dilaksanakan secara bertahap, agar setiap tahapan memiliki kemampuan menopang pembangunan untuk tahap berikutnya. (Salim, 1993)

Agenda 21 Rio mengartikan pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Intinya adalah bahwa pembangunan permukiman yang berkelanjutan adalah peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan dan untuk itu perlu peningkatan kualitas permukiman itu sendiri (UNDP, 1997:1).

Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, seperti yang di deklarasikan dalam pertemuan Rio + 10 di Johannesburg 2002, yaitu perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan setiap pembangunan dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan interaksi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. (Sugandhy dan Hakim, 2007:22-23).



Sumber: Von Stokar et al dalam Sugandhy dan Hakim, 2007

GAMBAR 2.2
THREE DIMENSIONAL MODEL

Pengembangan lingkungan buatan manusia yang akan mengubah lingkungan alam harus memperhatikan kelangsungan fungsi alam, sehingga perubahan itu tidak akan merugikan manusia. (Salim, 1993:201). Banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan fungsi alam sehingga dalam jangka panjang kerugiannya lebih besar dibanding manfaatnya.

2.6.3 Kepuasan Terhadap Lingkungan Hunian.

Di dalam masyarakat, keterikatan akan rumah dan lingkungan tetangga bisa sangat kuat, terutama jika mereka yang tinggal dirumah-rumah kumuh. Program pemerintah dalam peremajaan kawasan kota dengan memindahkan masyarakat ke kawasan tertentu yang dianggap lebih baik secara fisik, akan menghilangkan keterikatan sosial dengan teman-teman dan tetangganya di daerah yang lama. Jika masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bisa saja menimbulkan stres, apalagi jika keterikatan dengan lingkungan lama yang cukup kuat. (Halim, 2008:25)

Keterikatan akan tempat hunian tidak saja dipengaruhi oleh hubungan sosial dengan tetangganya, namun kenangan masa lalu, seperti kehidupan masa kecil, juga akan membuat masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya. Ketakutan akan kehilangan historis sejarah tersebut apabila pindah ke tempat baru. (Halim, 2008:22)

Pada penentuan tempat tinggal, seseorang akan memilih rumah terletak pada kemampuan lingkungan yang dipilihnya dalam membentuk ruang fisik dan sosial. Penataan lingkungan yang baik dan hubungan kohesivitas warga adalah faktor penting untuk menentukan pilihan. (Halim, 2008:25)

Faktor ekonomi juga berperan dalam penentuan tempat tinggal. Seseorang dengan tingkat ekonomi yang mapan akan mempunyai banyak pilihan dalam menentukan tempat tinggalnya dibanding orang yang berpenghasilan sedang atau rendah. (Halim, 2008:26)

Keamanan atau tingkat kejahatan yang rendah merupakan faktor lain dalam penentuan tempat tinggal. Seseorang yang mempunyai kemampuan ekonomi, namun cukup puas dengan lingkungan dimana dia tinggal karena merasa aman dan nyaman. Hal ini menunjukkan faktor psikologis lebih penting dalam menentukan kepuasannya, karena tidak lagi mempertimbangkan sebgus apa rumah tersebut

atau sestrategis apa lokasi hunian. Ketika sudah terbiasa dengan sebuah hunian yang dihuninya, orang tersebut akan mengembangkan kepuasan terhadap kemampuannya sendiri. (Halim, 2008).

Salah satu faktor penting dalam hal kenyamanan hunian adalah faktor kesehatan lingkungan. Ada keterkaitan antara kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat akan membentuk kualitas lingkungan, namun sebaliknya dapat juga terjadi kualitas lingkungan membentuk perilaku masyarakat (Amsyari, 1996:141). Sehingga kesehatan lingkungan yang baik akan membuat perilaku masyarakatnya menjadi lebih sehat.

2.7. Lesson Learn : Program Slum Upgrading di Bangbua Bangkok-Thailand

Bangbua merupakan daerah permukiman di sepanjang kanal, yang berkepadatan tinggi di setiap sisinya. Sebagian masyarakat tinggal di bantaran kanal, dan sebagian lainnya tinggal di badan kanal. Warga merupakan pendatang dan tinggal secara ilegal tanpa ijin dari pemilik lahan, *Treasury Departemen*.

Bangbua merupakan lokasi lokasi *pilot project* Ban Mankong tepi kanal yang dikembangkan oleh CODI dengan pola pembagian *land sharing*. Masyarakat memerankan diri sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, dan pengendalian pembangunan di lokasi tersebut. CODI mencoba menerapkan paradigma baru dalam pembangunan yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*).

People empowerment telah dilakukan oleh CODI bekerjasama dengan *Sripatum University* terhadap masyarakat dan pihak pemilik lahan, *Treasury Department*. Kepada masyarakat Bangbua, CODI menyadarkan masyarakat akan pentingnya bekerjasama membentuk komunitas dan menggali potensi dan permasalahan sendiri di tingkat masyarakat. Serta upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah kanal tersebut. Ini merupakan bentuk dari upaya menguatkan dan memampukan masyarakat dalam rangka memandirikan serta menempatkan/mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

CODI ingin menerapkan *social learning* dalam proses pembangunan atau perbaikan permukiman di sepanjang Kanal Bangbua. Komunitas didampingi untuk dapat melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas dalam upaya

perbaikan, membuat kesepakatan-kesepakatan dan merumuskan skema atau desain pembangunan perumahan.

Pada awalnya kawasan ini adalah daerah pinggiran sungai dengan kondisi wilayah yang berawa dan menjadi salah satu penyebab munculnya banjir di Kota Bangkok, maka setelah dilakukan penataan dan pendampingan yang intensif dari CODI, kawasan ini menjelma menjadi kawasan yang lebih teratur yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai seperti pelayanan listrik, air bersih dan persampahan.

Perkembangan kawasan Bangbua yang tergolong pesat baik itu dari segi fisik maupun ekonomi menjadikan kawasan ini sebagai proyek percontohan untuk kasus permukiman kumuh di daerah pesisir (*waterfront*). Keberhasilan komunitas bangbua meningkatkan kualitas permukiman mereka memicu kawasan di sekitarnya untuk ikut berkembang.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2009

GAMBAR 2.3
KONDISI FISIK LINGKUNGAN SEBELUM (KIRI)
DAN SETELAH PENATAAN (KANAN)

Dari Gambar 2.3 diatas dapat dilihat bahwa sebelum penataan, rumah masyarakat dibangun diatas badan kanal dan nampak tidak teratur. Namun setelah penataan, rumah-rumah yang dibangun diatas kanal dibongkar dan dibangun diluar badan

kanal serta ditata menjadi lebih teratur. Rumah-rumah tersebut dibangun menghadap kanal dan disiapkan fasilitas pembuangan sampah sehingga masyarakat tidak membuang limbahnya di kanal.

2.8. Sintesis Teori

Sintesa teori merupakan perumusan variable yang digunakan dalam penelitian pengaruh penataan bantaran sungai terhadap pola hunian masyarakat. Variabel ini nantinya akan dijadikan acuan dalam penentuan metode dan pembuatan kuesioner. Berikut ini adalah tabel sintesis teori berdasarkan kajian pustaka:

**TABEL II.1
SINTESIS TEORI**

SUBYEK	URAIAN	SUMBER	VARIABEL
Rumah	Rumah sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga	- UU nomor 4 tahun 1992	- fisik rumah - Ratio luas rumah terhadap penghuni
	Rumah sebagai status sosial	- Duncan dalam Halim	- Tingkat kriminalitas
	Rumah sebagai identitas keluarga, kehidupan sosial, budaya, penunjang rasa aman dan status kepemilikan	- Turner	- Tingkat pendidikan - Ikatan sosial - Interaksi sosial
Perumahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan		- Waktu membangun rumah - Arah hadap membangun rumah - Ruang dalam rumah - Fungsi rumah

Lanjut

Lanjutan

SUBYEK	URAIAN	SUMBER	VARIABEL
Permukiman	permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan	- UU nomor 4 tahun 1992	<ul style="list-style-type: none"> - Status kepemilikan rumah - Ketersediaan sarana dan prasarana
Masyarakat	Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu dan kelas-kelas tertentu berdasarkan sifat konsumtifnya	<ul style="list-style-type: none"> - Soekanto dalam Hariyono, 2007 - Mangkunegara dalam hariyono, 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan - Tingkat peranan dalam kelompok - Tingkat pendidikan - Hubungan kekerabatan - Mata pencaharian - Kemampuan memenuhi kebutuhan primer

..... Lanjut

Lanjutan

SUBYEK	URAIAN	SUMBER	VARIABEL
Pola hunian di bantaran sungai	Masyarakat memandangi sungai sebagai tempat buangan sehingga rumah-rumah penduduk umumnya membelakangi sungai	- Hadi dalam Yuwono, dkk (ed),2003:76	<ul style="list-style-type: none"> - Arah hadap rumah - Fisik rumah - Penataan rumah - Kebiasaan buang sampah - Kebiasaan buang hajat
Lingkungan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas kehidupan di lingkungan kumuh menghambat potensi produktivitas dan kewirausahawan serta kesehatan - Lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni yang keadaannya tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif 	<ul style="list-style-type: none"> - Salim, 1993 - Reid dalam Syarifuddin - Notoadmojo - Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun 1993 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan kerja - Tingkat Pendapatan - Mata pencaharian - Tingkat kesehatan - Fisik rumah - Legalitas rumah - Fisik Lingkungan

Lanjut

..... Lanjutan

SUBYEK	URAIAN	SUMBER	VARIABEL
Kepuasan terhadap lingkungan	<p>Kepuasan terhadap lingkungan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, historis, penataan lingkungan yang baik, ekonomi, keamanan dan kenyamanan,</p> <p>Ada keterkaitan antara kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat akan membentuk kualitas lingkungan, namun sebaliknya dapat juga terjadi kualitas lingkungan membentuk perilaku masyarakat.</p> <p>1996:141). Sehingga kesehatan lingkungan yang baik akan membuat perilaku masyarakatnya menjadi lebih sehat.</p>	<p>- Halim, 2008</p> <p>Amsyari, 1996</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lama bermukim - Hubungan harmonis dengan tetangga - Sifat kebersamaan - Ketersediaan sarana dan prasarana - Ketersediaan Prasarana - Ketersediaan Sarana - Tingkat kebisingan - Tingkat kriminalitas - Jarak dengan tempat kerja - Tingkat kesehatan

Sumber : Peneliti, 2009

Tidak semua variabel yang ada tersebut digunakan sebagai variabel penelitian Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Terhadap Pola Hunian Masyarakat, tetapi akan dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Variabel

data terpilih ini akan mengacu pada empat sasaran yaitu fisik perumahan, ekonomi masyarakat, sosial masyarakat dan budaya masyarakat.

TABEL II.2
VARIABEL TERPILIH

SASARAN	VARIABEL	PARAMETER
FISIK	<ul style="list-style-type: none"> - Arah hadap rumah - Fisik rumah - Fungsi Rumah - Pembangunan fisik lingkungan 	jumlah rumah yang menghadap sungai, jumlah rumah yang mengalami perbaikan, jumlah rumah yang mengalami perubahan fungsi
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan - Mata pencaharian 	Jumlah penghasilan dan jenis pekerjaan
SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan - Lama bermukim - Kebiasaan buang sampah - Kebiasaan buang hajat - Kegiatan waktu luang 	Jumlah penduduk, status penduduk, lama bermukim, aktivitas masyarakat
BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat Gotong royong - Waktu membangun rumah - Arah hadap membangun rumah - Ruang dalam rumah 	intensitas gotong royong, kepercayaan terhadap waktu dan arah hadap yang baik dalam membangun. Ruang yang paling mendapat perhatian dalam membangun rumah

Sumber : Peneliti, 2009

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA BAU-BAU DAN KAWASAN PERUMAHAN DI BANTARAN SUNGAI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU

Pada bab ini akan dijelaskan kondisi umum Kota Bau-Bau yang meliputi karakteristik fisik dasar dan kondisi kependudukan, serta gambaran umum lokasi penelitian yang terletak di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Program penataan bantaran sungai yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau juga akan disinggung pada bab ini. Tujuan dari penulisan bab ini adalah memberikan gambaran umum mengenai letak lokasi penelitian beserta karakteristik masyarakatnya.

3.1 Karakteristik Fisik Dasar

Karakteristik fisik dasar kota yang akan dijelaskan pada sub bab ini adalah letak geografis Kota Bau-Bau, kondisi topografi dan penggunaan lahan yang ada. Letak geografis akan memberikan gambaran tentang letak Kota Bau-Bau dan batas administrasinya, kondisi topografi, memberikan gambaran permukaan tanah, sedangkan penggunaan lahan memberikan gambaran tentang luas area pemanfaatan lahan yang ada.

3.1.1 Letak Geografis

Kota Bau-Bau secara geografis terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Tenggara, terletak pada posisi $05^{\circ}15' - 05^{\circ}32' \text{ LS}$ dan $122^{\circ}30' - 122^{\circ}46' \text{ Bujur Timur}$. Adapun Batas Wilayah Administrasi Kota Bau-Bau adalah (lihat Gambar 3.1):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

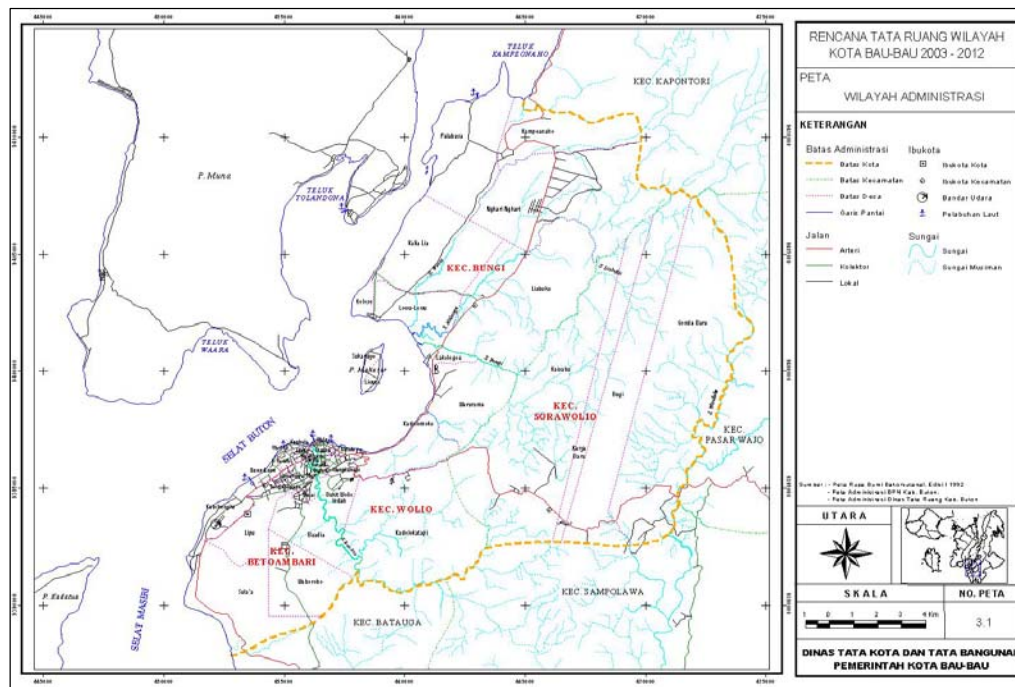
Kota Bau-Bau mempunyai luas 221,00 Km yang meliputi wilayah Kecamatan Wolio, kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Betoambari, kecamatan

murhum, Kecamatan Sorawolio, dan Kecamatan Bungi yang seluruhnya terdiri dari 38 kelurahan/desa (lihat Tabel III.1).

TABEL III.1
LUAS WILAYAH KOTA BAU-BAU

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	PROSENTASE (%)
1.	Wolio	17,33	7,84
2.	Kokalukuna	9,44	4,27
3.	Betoambari	27,89	12,62
4.	Murhum	6,45	2,92
5.	Sorawolio	83,25	37,67
6.	Bungi	76,64	34,68
JUMLAH		221,00	100,00

Sumber : Kota Bau-Bau dalam angka, 2008



Sumber : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Bau-Bau, 2003

GAMBAR 3.1
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BAU-BAU

3.1.2 Topografi

Kota Bau-Bau mempunyai topografi yang bervariasi, ada yang datar, bergelombang hingga berbukit. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-8% adalah kawasan yang berada dibagian utara dan barat wilayah kota Bau-Bau, semakin ke timur kemiringan semakin besar karena kawasan tersebut merupakan perbukitan yang membentang dari Utara ke Selatan dan Bau-Bau memberikan ciri yang menonjol pada kondisi topografi wilayah ini. Ketinggian wilayah Kota Bau-Bau adalah lebih dari 5 meter diatas permukaan laut.

3.1.3 Penggunaan Lahan

Daerah Kota Bau-Bau dengan luas 22.100 ha pada tahun 2007. memiliki lahan sawah seluas 1.010 ha, pekarangan seluas 2.117 ha, tegal/kebun seluas 2.855 ha, lading/huma seluas 1.431 ha, padang rumput seluas 486 ha, hutan Negara seluas 9.889 ha. Penggunaan lahan Kota Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

TABEL III.2
PENGGUNAAN LAHAN KOTA BAU-BAU TAHUN 2007

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1.	Pekarangan	2177	8,19
2.	Tegal/Kebun	2855	2,98
3.	Ladang/Huma	1413	8,67
4.	Padang Rumput/Pengembalaan	486	3,90
5.	Sementara Tidak Diusahakan	48	3,42
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	845	2,46
7.	Hutan Negara	9889	43,35
8.	Perkebunan Rakyat	1876	14,62
9.	Rawa-rawa yang ditanami	233	0,02
10.	Kolam/Tambak	65	0,38
11.	Sawah	1010	4,41
12.	Lainnya	1203	6,44
JUMLAH		22,100.00	100,00

Sumber: Bau-Bau dalam Angka,2008

3.2 Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan memberikan gambaran tentang jumlah penduduk serta kepadatan penduduk Kota Bau-Bau. Disamping itu juga memberikan

gambaran tentang struktur umur penduduk, yaitu umur penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan penduduk serta kelompok sosial masyarakat.

3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bau-Bau pada tahun 2007 adalah 124.607 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 21.599 KK. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Murhum dengan jumlah penduduk sebanyak 42.830 jiwa (34,37%) dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sorawolio yaitu sebanyak 66.24 jiwa (5,31%).

Dengan luas wilayah 22.100 Ha, maka kepadatan penduduk Kota Bau-Bau adalah sekitar 5,63 jiwa/Ha. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Wolio yaitu sekitar 19,06 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Sorawolio yaitu 0,8 jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.3
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA BAU-BAU
TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	JML. PENDUDUK (JIWA)	LUAS (HA)	KEPADATAN (JIWA/HA)
1.	Wolio	33028	1733	19,06
2.	Kokalukuna	15378	944	16,29
3.	Betoambari	13901	2789	4,98
4.	Murhum	42830	645	66,40
	Sorawolio	6624	8325	0,80
	Bungi	12848	7664	1,68
JUMLAH		124067	22100	

Sumber : Bau-Bau dalam Angka 2008

3.2.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur dapat dikelompokkan usia produktif (15 tahun – 54 tahun) dan usia non produktif (0 – 14 tahun dan > 54 tahun). Kelompok usia produktif di Kota Bau-Bau pada tahun 2007 sejumlah 74.008 jiwa atau 59,39% sedangkan kelompok usia non produktif sejumlah 50.601 atau 40,61%.

Sedangkan struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kota Bau-Bau tahun 2007, dapat dikatakan cukup berimbang. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 61.395 jiwa atau 49,27 % dan perempuan sebanyak 63.214 jiwa atau 50,73 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel III.4.

TABEL III.4
JUMLAH PENDUDUK KOTA BAU-BAU
MENURUT STRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2007

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (L+P)
1.	0 – 4	7.763	7.440	15.203
2.	5 – 9	7.887	7.562	15.449
3.	10 – 14	7.887	7.653	15.530
4.	15 – 19	8.031	8.126	16.157
5.	20 – 24	6.017	6.756	12.773
6.	25 – 29	4.692	5.111	9.803
7.	30 – 34	4.049	4.199	8.248
8.	35 – 39	3.446	3.653	7.099
9.	40 – 44	2.911	3.029	5.940
10.	45 – 49	2.261	2.447	4.708
11.	50 – 54	1.881	1.988	3.869
12.	55 – 59	1.405	1.551	2.956
13.	60 – 64	1.170	1.285	2.455
14.	65 >	2.005	2.414	4.419
JUMLAH		61.395	63.214	124.609

Sumber: Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

3.3. Gambaran Kelurahan Tomba dan Bataraguru Serta Penataan Bantaran Sungai

Gambaran Kelurahan Tomba dan Bataraguru akan disajikan dalam sub bab ini, baik itu gambaran luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakatnya. Penataan bantaran Sungai Bau-Bau yang telah dan sedang dilaksanakan juga akan dibahas pada sub bab ini.

3.3.1 Gambaran Kelurahan Tomba

Kelurahan Tomba terletak di Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Luas wilayah kelurahan tomba sebesar 19 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 3.472 jiwa, yang terdiri dari 1754 laki-laki dan 1718 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga yang ada di kelurahan Tomba sebanyak 859 KK.

TABEL III.5
PROFIL KELURAHAN TOMBA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Luas Wilayah	19 Ha
2	Jumlah Penduduk	3.472 Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	859 KK
4	Aset Perumahan: A. Menurut Dinding: a. Tembok b. Kayu B. Menurut Lantai: a. Keramik b. Semen c. Kayu	 520 Unit 120 Unit 358 Unit 280 Unit 9 Unit
5	Status Rumah Tangga: Sejahtera 1 Prasejahtera	 184 KK 263 KK

Sumber : Profil Kelurahan Tomba 2008, diolah

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa sebagian rumah masyarakat yang ada di Kelurahan Tomba merupakan rumah permanen. Namun sebagian besar msyarakatnya masih dalam status rumah tangga prasejahtera. Artinya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar adalah tamatan SMP dan SMA. Adapun persebaran tingkat pendidikan masyarakat adalah: 279 orang tamatan SMP, 320 orang tamatan SMA, 72 orang tamatan Diploma, 94 orang S.1 dan 7 orang S.2. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah pada sebagai PNS/TNI/POLRI.

**TABEL III.6
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT**

NOMOR	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani/Buruh Tani	47 orang
2	PNS/TNI/POLRI	251 orang
3	Pengrajin/Pedagang keliling	93 orang
4	Peternak/Nelayan	46 orang
5	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	28 orang
6	Pengusaha Kecil dan Menengah	163 orang
7	Lain-Lain	164 orang

Sumber : Profil Kelurahan Tomba 2008, diolah

3.3.2 Gambaran Kelurahan Bataraguru

Kelurahan Bataraguru terletak di Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Luas wilayah kelurahan tomba sebesar 21 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 8.024 jiwa, yang terdiri dari 4.114 laki-laki dan 3.910 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga yang ada di kelurahan Bataraguru sebanyak 1779 KK.

**TABEL III.7
PROFIL KELURAHAN BATARAGURU**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Luas Wilayah	21 Ha
2	Jumlah Penduduk	8.024 Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	1779 KK
4	Aset Perumahan: A. Menurut Dinding: a. Tembok b. Kayu B. Menurut Lantai: a. Keramik b. Semen c. Kayu	240 Unit 80 Unit 30 Unit 260 Unit 60 Unit
5	Status Rumah Tangga: Sejahtera 1 Prasejahtera	781 KK 543 KK

Sumber : Profil Kelurahan Bataraguru 2008, diolah

Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar adalah tamatan SMP dan SMA. Adapun persebaran tingkat pendidikan masyarakat adalah: 1142 orang tamatan SMP, 1329 orang tamatan SMA, 117 orang tamatan Diploma, 174 orang S.1 dan 7 orang S.2. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah pada sebagai PNS/TNI/POLRI.

TABEL III.8
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

NOMOR	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani/Buruh Tani	40 orang
2	PNS/TNI/POLRI	140 orang
3	Pengrajin/Pedagang keliling	211 orang
4	Peternak/Nelayan	12 orang
5	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	22 orang
6	Pengusaha	28 orang
7	Lain-Lain	95 orang

Sumber : Profil Kelurahan Bataraguru 2008, diolah

3.3.3 Program Penataan Bantaran Sungai

Lokasi penelitian adalah perumahan masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran Sungai Bau-Bau. Secara administratif lokasi studi berada pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Dimana pada saat observasi diketahui terdapat 184 KK yang masuk dalam lokasi studi di kawasan tersebut, dengan perincian 102 KK berada di Kelurahan Tomba dan 82 KK berada di Kelurahan Bataraguru.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan penataan bantaran Sungai Bau-Bau. Program penataan tersebut dimulai dengan normalisasi sungai Bau-Bau sepanjang kurang lebih 1000 meter yang melewati Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Program normalisasi sungai berlangsung selama dua tahu, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tanggul penahan dan akses jalan selebar 6 meter. Program pembuatan tanggul penahan dengan panjang 900 meter dan jalan lingkungan dengan panjang 700 meter tersebut dilaksanakan pada tahun 2007.

3.3.3.1 Pengerukan Sungai Bau-Bau

Sungai Bau-Bau membelah tengah kota dan menjadi batas administratif dua kecamatan, yaitu Kecamatan Murhum dan Kecamatan Wolio. Sungai Bau-Bau mempunyai lebar \pm 60 meter dengan kedalaman pada daerah sekitar muara sungai berkisar antara 2-4 meter. Pada masa lalu, hingga awal tahun 1990-an sungai tersebut masih dijadikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal pinisi yang mengangkut barang dan kapal penangkap ikan. Namun seiring dengan terbentuknya sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan terutama pada daerah sekitar muara sungai dan telah diperluasnya kawasan pelabuhan Murhum yang terletak tidak jauh dari muara sungai, maka aktivitas bongkar muat barang turut pindah ke kawasan pelabuhan.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bau-Bau membuat rencana program pengerukan Sungai Bau-Bau. Pengerukan muara sungai Bau-Bau dilaksanakan dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,-. Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2007, dengan melaksanakan pengerukan sungai Bau-Bau pada wilayah Kelurahan Tomba dan Bataraguru dengan anggaran sebesar Rp.3.050.000.000,-. Kegiatan pengerukan Sungai Bau-Bau dilaksanakan sepanjang kurang lebih satu kilo meter. Pelaksanaannya dimulai dari muara sungai dan mengarah ke hilir. Program kegiatan pengerukan Sungai Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

TABEL III.9
REALISASI PROGRAM Pengerukan SUNGAI BAU-BAU

NOMOR	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	Pengerukan muara Sungai Bau-Bau	Rp. 1.000.000.000	2006
2	Pengerukan Muara Sungai Bau-Bau (Tahap II)	Rp. 1.550.000.000	2007
3	Pengerukan Sungai Bau-Bau (Bataraguru, Tomba)	Rp. 1.500.000.000	2007

Sumber: DPA Dinas PU Kota Bau-Bau T.A 2006 dan 2007



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 3.2
KONDISI SUNGAI BAU-BAU SAAT INI

3.3.3.2 Peningkatan Jalan Inspeksi

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Bau-Bau meningkatkan jalan inspeksi yang ada di bantaran Sungai Bau-Bau. Awalnya, jalan yang ada mempunyai lebar 3 meter dengan kondisi rusak. Jalan tersebut tidak terakses dengan jalan lain yang ada di sekitar kawasan tersebut, sehingga terkesan sebagai jalan buntu. Namun setelah peningkatan lebar jalan tersebut menjadi 6 meter dan teraspal bagus Adapun program kegiatan peningkatan jalan inspeksi dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

TABEL III.10
REALISASI PROGRAM PENINGKATAN JALAN INSPEKSI

NOMOR	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	Peningkatan Jalan Inspeksi Sungai Bau-Bau (Kel. Tomba)	Rp. 1.598.892.000	2007
2	Peningkatan Jalan Inspeksi Sungai Bau-Bau (Kel. Bataraguru)	Rp. 570.640.000	2007

Sumber: DPA Dinas PU Kota Bau-Bau T.A 2007

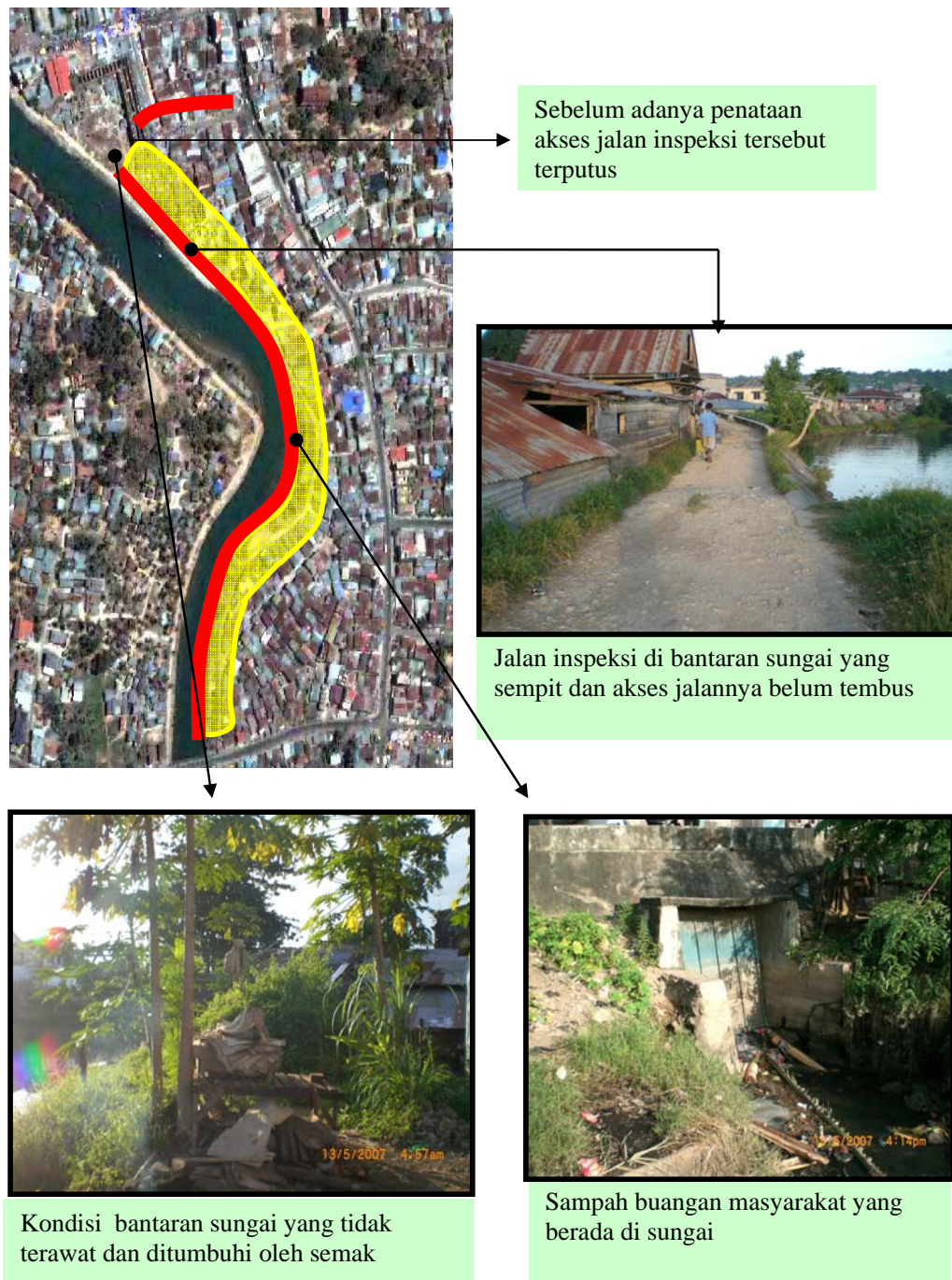
Realisasi dari program peningkatan jalan inspeksi tersebut adalah terbangunnya jalan inspeksi sepanjang ± 700 meter dengan lebar jalan 6 meter yang melalui kelurahan Tomba dan Bataraguru. Kendaraan roda empat dapat lalu lalang dengan leluasa karena jalan inspeksi tersebut telah terakses dengan kawasan sekitar, terutama kawasan pasar La Elangai yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut.



Sumber: Laporan Proyek Tahun 2007, Dinas PU Kota Bau-Bau

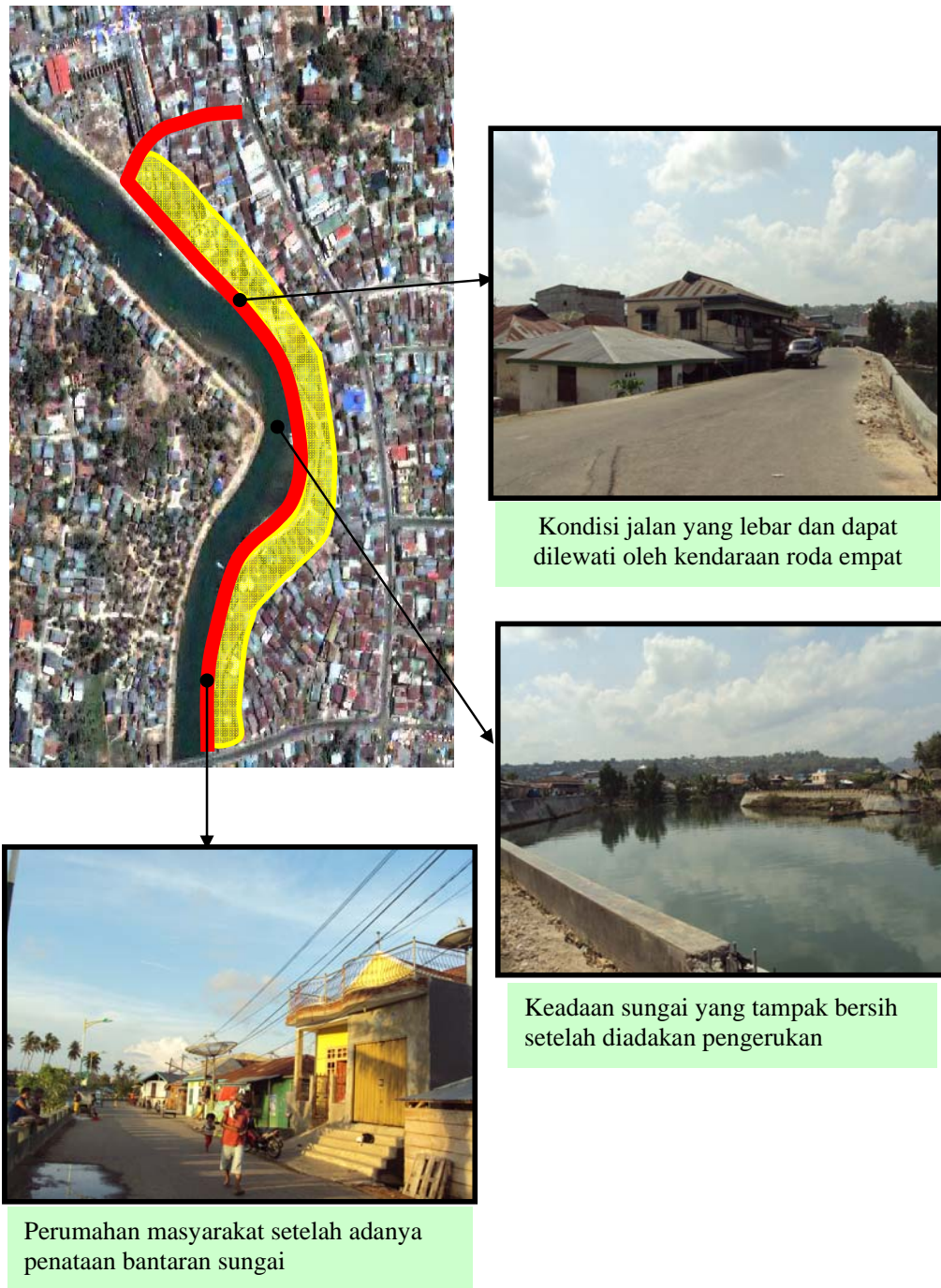
GAMBAR 3.3 **PELAKSANAAN PENINGKATAN JALAN INSPEKSI**

Hingga saat ini kegiatan penataan kawasan bantaran sungai Bau-Bau masih terus berlangsung, yaitu kegiatan pemasangan lampu jalan di daerah bantaran sungai dan diharapkan pada awal tahun 2010 ini sudah dapat berfungsi. Namun kegiatan pengerukan sungai, pembuatan tanggul penahan dan jalan inspeksi telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2007. Jalan inspeksi tersebut tidak saja melayani mobilitas masyarakat sekitar kawasan bantaran sungai, tetapi juga masyarakat yang berada diluar kawasan tersebut.



Sumber: Foto Dokumentasi Peneliti, 2007

GAMBAR 3.4
KONDISI PERUMAHAN DI DAERAH BANTARAN SUNGAI SEBELUM
DIADAKANNYA PENATAAN TAHUN 2007



Sumber: Foto Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 3.5
KONDISI PERUMAHAN DI DAERAH BANTARAN
SUNGAI SETELAH DIADAKANNYA PENATAAN TAHUN 2009

BAB IV

ANALISIS PENGARUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI TERHADAP POLA HUNIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TOMBA DAN BATARAGURU

Penataan bantaran sungai Bau-Bau yang dilaksanakan sejak tahun 2006 bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar bantaran sungai yang sudah mulai menurun. Dalam bab ini akan dianalisis bagaimana pola hunian masyarakat di bantaran sungai Bau-Bau sebelum dan sesudah adanya penataan ini. Untuk mengetahui hal tersebut akan dilakukan analisis karakteristik masyarakatnya dan analisis program penataan dibantaran sungai Bau-Bau. Setelah itu dilakukan identifikasi sekaligus analisis perubahan pola hunian sesudah adanya penataan. Selanjutnya dianalisis aktivitas masyarakat pada kawasan tersebut sebelum dan sesudah adanya kegiatan penataan. Pada akhir bab ini juga akan menyajikan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis diatas.

4.1 Analisis Karakteristik Masyarakat di Kawasan Bantaran Sungai

Untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai Bau-Bau, Peneliti menyebar kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 65. Karena lokasi penelitian terdapat di dua kelurahan yaitu, Kelurahan Tomba dan Bataraguru, maka penyebarannya juga dilakukan pada kedua kelurahan tersebut secara proporsional. Pada Kelurahan Bataraguru disebar sebanyak 29 kuesioner sedangkan pada Kelurahan Tomba sebanyak 36 kuesioner. Penyebaran kuesioner dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran karakteristik masyarakat pada kawasan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mengandung identifikasi karakteristik masyarakatnya meliputi Usia, mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, lama bermukim, status kepemilikan rumah. Uraian analisis untuk seluruh item pertanyaan untuk mengetahui karakteristik masyarakat secara rinci akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram untuk memperjelas analisis secara deskriptif.

4.1.1 Kelompok Usia Masyarakat

Kelompok usia tenaga kerja dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok usia produktif dan tidak produktif. Kelompok usia produktif yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah kelompok umur antara 20-50 tahun. Sedangkan untuk kelompok umur tidak produktif adalah kelompok umur dibawah 20 tahun dan diatas 50 tahun. Untuk mengetahui kelompok usia yang dominan dalam masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

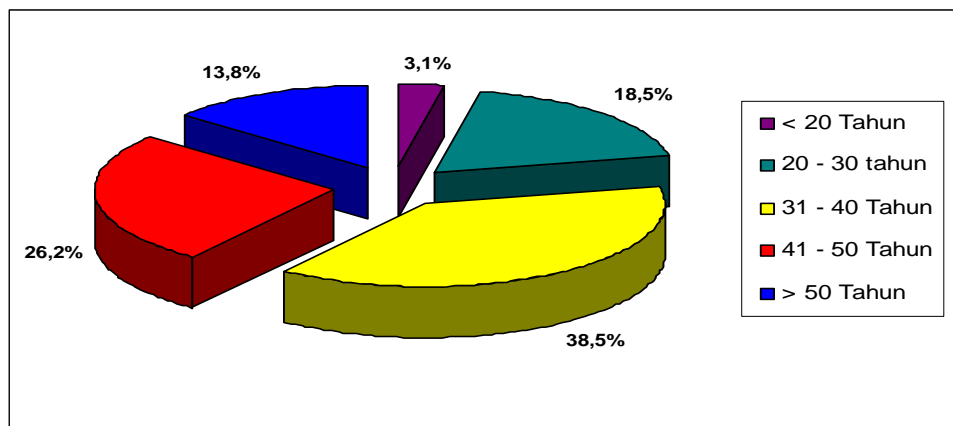
**TABEL IV.1
KELOMPOK UMUR RESPONDEN**

KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSEN (%)
< 20 Tahun	2	3,1
20 - 30 tahun	12	18,5
31 - 40 Tahun	25	38,5
41 - 50 Tahun	17	26,2
> 50 Tahun	9	13,8
JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa prosentase kelompok umur terbesar adalah pada kelompok umur 31–40 tahun yaitu 38,5%, diikuti prosentase terbesar kedua yaitu kelompok umur antara 41–50 tahun sebesar 26,2%, prosentase terbesar ketiga yaitu kelompok umur 20–30 tahun sebesar 18,5%, prosentase terbesar keempat yaitu kelompok umur diatas 50 tahun sebesar 13,8%. Sedangkan prosentase kelompok umur terkecil adalah pada kelompok umur dibawah 20 tahun. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif (antara 20–50 tahun), dengan prosentase sebesar 83,2%. Artinya, kesempatan responden untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuannya masih cukup besar. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap potensi yang dimiliki masyarakat di

kawasan bantaran Sungai Bau-Bau, sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.1
DIAGRAM KELOMPOK UMUR RESPONDEN

4.1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kawasan bantaran sungai Bau-Bau umumnya berpendidikan rendah, rata-rata hanya tamatan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

TABEL IV.2
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Tamat SD	14	21,5
2	Tamat SMP	18	27,7
3	Tamat SMA	22	33,8
4	Diploma III	0	0,0
5	S.1	11	16,9
6	Lainnya	0	0
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran sungai hanya berpendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) dengan prosentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 83,1%. Sedangkan sisanya adalah masyarakat berpendidikan tinggi (S.1) dengan prosentase sebesar 16,9%. Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pada kawasan tersebut tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan membuat kesempatan masyarakat dalam mencari peluang berusaha menjadi terbatas. Karena pada umumnya, rendahnya tingkat pendidikan berarti juga rendahnya kemampuan (*skill*) masyarakat.

4.1.3 Karakteristik Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai tersebut bekerja di sektor informal. Hal ini tidak mengherankan karena pasar dan pusat pertokoan berada tidak jauh dari kawasan tersebut. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

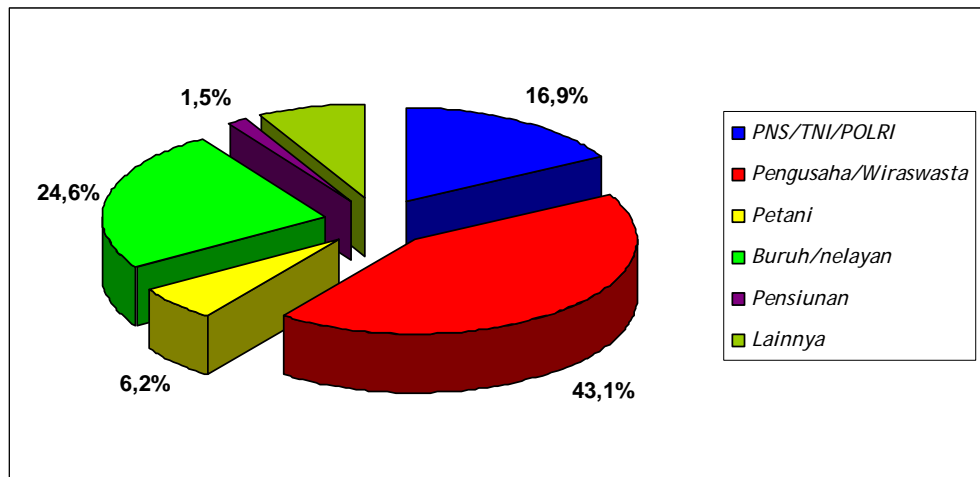
TABEL IV.3
MATA PENCAHARIAN RESPONDEN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	PNS/TNI/POLRI	11	16,9
2	Pengusaha/Wiraswasta	28	43,1
3	Petani	4	6,2
4	Buruh/nelayan	16	24,6
5	Pensiunan	1	1,5
6	Lainnya	5	7,7
	Total	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa prosentase terbesar mata pencaharian masyarakat pada kawasan tersebut adalah berprofesi sebagai pengusaha/wiraswasta yaitu sebesar 43,1%. Persentase terbesar kedua adalah profesi buruh/nelayan sebesar 24,6%, diikuti oleh profesi PNS/TNI/POLRI sebesar 16,9%. Selanjutnya responden yang menjawab jenis pekerjaan lainnya sebanyak 7,7%. Sedangkan prosentase terkecil mata pencaharian masyarakat adalah berprofesi sebagai pensiunan yaitu sebesar 1,5%. Berdasarkan hal tersebut

dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Bau-Bau bekerja pada sektor informal.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.2
DIAGRAM MATA PENCAHARIAN RESPONDEN

4.1.4 Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran sungai Bau-Bau tersebut tergolong rendah. Jumlah masyarakat yang berpendapatan dibawan Rp. 500.000 dan berpendapatan antara Rp.500.000 hingga Rp. 1.000.000 mempunyai prosentase yang sama yaitu sebesar 30,8%. Sedangkan masyarakat yang berpendapatan antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000 mempunyai prosentase 24,6%. Sisanya, masyarakat yang berpendapatan cukup tinggi yaitu diatas Rp.2.000.000 mempunyai prosentase paling sedikit yaitu 13,8%.

TABEL IV.4
TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN

NO	JUMLAH PENGHASILAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	< Rp. 500.000	20	30,8
2	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	20	30,8
3	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	16	24,6
4	> Rp. 2.000.000	9	13,8
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Rendahnya pendapatan responden tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden cukup rendah. Kemampuan dalam mengakses lapangan kerja juga menjadi sangat terbatas akibat dari *skill* yang dimiliki juga terbatas. Sehingga mereka banyak bekerja pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan standar kemampuan yang tinggi dan pendapatan yang diterima rendah. Padahal sebagian besar responden yaitu sebesar 43,1% bermata pencaharian sebagai pengusaha/wiraswasta. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha masyarakat bergerak dalam usaha dengan modal sedikit (usaha kecil).

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat tersebut akan menjadi hambatan yang cukup besar dalam mendapatkan hunian yang layak. Padahal potensi usia masyarakat yang sebagian besar adalah usia produktif merupakan modal untuk mengembangkan kemampuan diri. Untuk itu perlu diberikan bantuan pelatihan keterampilan serta modal usaha untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat.



Akibat keterbatasan penghasilan, masyarakat sulit untuk mendapatkan rumah yang layak huni

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.3
RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK
LAYAK HUNI DI BATARAN SUNGAI BAU-BAU

4.1.5 Lama Bermukim Masyarakat

Untuk mengetahui pengaruh penataan terhadap pola hunian masyarakat, maka data lama bermukim ini sangat penting. Makin lama waktu bermukim masyarakat pada kawasan tersebut maka akan semakin paham akan kondisi

lingkungannya, baik pada waktu sebelum penataan ataupun setelah adanya penataan bantaran Sungai Bau-Bau.

Pengelompokan responden berdasarkan lama bermukim dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini:

**TABEL IV.5
LAMA BERMUKIM RESPONDEN**

NO	LAMA BERMUKIM	JUMLAH	PERSEN (%)
1	0 - 2 Tahun	2	3,1
2	2 - 5 Tahun	7	10,8
3	5 - 10 tahun	20	30,8
4	> 10 Tahun	36	55,4
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa persentase tertinggi lama bermukim masyarakat adalah kurun waktu diatas 10 tahun yaitu sebesar 55,4 %. Pada posisi kedua adalah masa bermukim masyarakat dalam kurun waktu 5-10 tahun sebesar 30,8%. Sedangkan pada posisi ketiga adalah masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut pada kurun waktu 2-5 tahun dengan persentase 10,8%. Untuk kurun waktu antara 0-2 tahun dapat dianggap atau dinyatakan bahwa masyarakat tersebut tidak mengalami secara langsung kondisi lingkungan sebelum adanya penataan tersebut. Namun mungkin saja mereka pernah melihat atau mendengar tentang kondisi lingkungan tersebut sebelum ditata.

4.1.6 Status Kependudukan Masyarakat

Status kependudukan masyarakat yang legal berarti adanya pengakuan bahwa masyarakat tersebut memang bermukim di kawasan bantaran sungai tersebut dan lokasi hunian masyarakat juga adalah legal sehingga berhak mendapatkan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah. Untuk mengetahui status masyarakat pada kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini:

TABEL IV.6
STATUS KEPENDUDUKAN RESPONDEN

NO	STATUS KEPENDUDUKAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ber-KTP	61	93,8
2	Surat Keterangan Domisili	4	6,2
3	Tidak Ber-KTP	0	0
4	Lainnya	0	0
JUMLAH		65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa 93,8 persen masyarakat pada kawasan tersebut ber-KTP sedangkan sisanya, yaitu sebesar 6,2% adalah mempunyai Surat Keterangan Domisili. Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut adalah legal.

4.1.7 Sikap Budaya Masyarakat Setempat

Sikap gotong-royong masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut sangat rendah. Sudah sangat jarang masyarakat bekerja sama dalam menjaga atau merawat lingkungan sekitar dan fasilitas umum yang ada. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa prosentase tertinggi, yaitu sebesar 47,7% responden mengatakan bahwa sikap gotong-royong masyarakat sudah jarang. Selanjutnya, 29,2% responden berpendapat lainnya. Responden yang berpendapat lainnya mengatakan bahwa kadang-kadang masyarakat mau diajak bekerja sama dalam merawat lingkungan sekitar, tetapi kadang-kadang juga menolak. Terdapat 16,9% masyarakat yang berpendapat bahwa sikap gotong-royong masih cukup erat. Sedangkan sisanya, sebesar 6,2% menjawab tidak tahu.

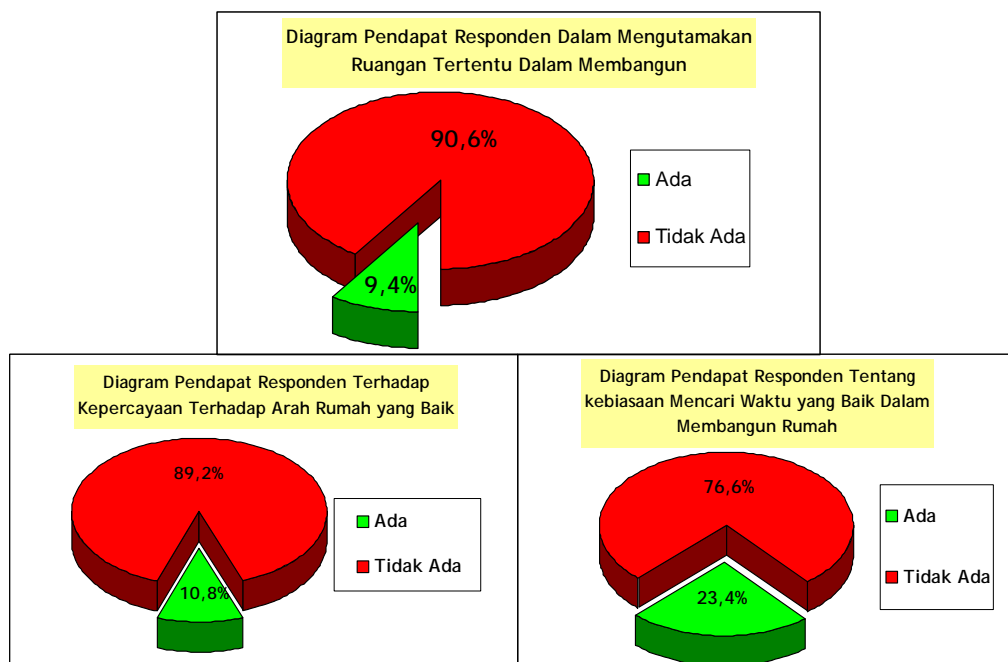
TABEL IV.7
SIKAP GOTONG-ROYONG RESPONDEN

NO	SIKAP GOTONG-ROYONG	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Masih cukup erat	11	16,9
2	Sudah jarang	31	47,7
3	Tidak tahu	4	6,2
4	Lainnya	19	29,2
JUMLAH		65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Kurangnya sikap gotong-royong masyarakat tidak terlepas dari waktu luang yang dipunyai. Berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak masyarakat yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Rutinitas pekerjaan tersebut dilakukan tiap hari. Bahkan pada hari minggu masyarakat tersebut tetap bekerja. Sehingga waktu luang yang dipunyai masyarakat sangat sedikit.

Kepercayaan/budaya terhadap arah hadap rumah yang baik, mencari waktu yang baik dalam membangun rumah serta mengutamakan ruangan tertentu dibanding ruangan lainnya, akan berpengaruh terhadap pola membangun rumah masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai Bau-Bau. Hal ini tentu akan mempengaruhi pola hadap rumah terhadap sungai. Untuk mengetahui apakah ada kepercayaan atau kebiasaan dalam membangun rumah dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.4
DIAGRAM PENDAPAT RESPONDEN TENTANG ADA ATAU
TIDAKNYA BUDAYA/KEBIASAAN DALAM MEMBANGUN RUMAH

Dari Gambar 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa diatas 75% responden menyatakan bahwa tidak ada kepercayaan mencari hari yang baik dalam

membangun rumah, arah hadap rumah yang baik serta mengutamakan ruangan tertentu dalam membangun rumah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan atau budaya tersebut diatas tidak akan mempengaruhi masyarakat di kawasan bantaran sungai tersebut dalam membangun hunian.

Kesimpulan yang didapat dalam identifikasi karakteristik masyarakat di bantaran Sungai Bau-Bau adalah bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat di bantaran sungai Bau-Bau masih rendah. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal. Rendahnya tingkat pendapatan akan berimplikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak juga terbatas. Selain itu telah ada pergeseran sifat gaya hidup masyarakatnya dari sifat masyarakat pedesaan yang memiliki rasa kebersamaan dan gotong-royong cukup tinggi, kearah masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya sikap gotong royong masyarakat.

4.2 Analisis Kegiatan Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau

Program penataan bantaran sungai yang dilaksanakan di kelurahan Tomba dan Bataraguru bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan tersebut. Dilaksanakan sejak tahun 2006, yang dimulai dengan kegiatan pengerukan sungai Bau-Bau hingga pembuatan talud penahan, pelebaran dan pengaspalan jalan inspeksi pada tahun 2007. Hingga saat ini kegiatan penataan tersebut masih berlangsung, salah satu kegiatannya adalah pemasangan lampu jalan di sekitar bantaran sungai Bau-Bau.

4.2.1 Pengerukan Sungai Bau-Bau

Program pengerukan sungai Bau-Bau telah membuat daerah aliran sungai Bau-Bau menjadi lebih dalam serta air sungai menjadi lebih jernih. Namun pada beberapa titik di badan sungai masih terlihat sedimen yang belum terangkat. Pengerukan yang tidak tuntas tersebut akan mempercepat proses sedimentasi berlangsung sehingga pendangkalan sungai akan terjadi lebih cepat. Untuk menghindari proses pendangkalan sungai yang lebih cepat, maka program pengerukan sungai Bau-Bau sebaiknya dilanjutkan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengangkat sedimen yang masih terlihat di badan sungai.

Pada daerah sekitar muara sungai juga sering menjadi tempat berlabuh kapal-kapal penangkap ikan dan penumpang berukuran kecil. Apalagi pada waktu musim timur, dimana terjadi ombak yang cukup besar di laut, banyak sekali kapal dan perahu yang berlindung di sekitar muara sungai untuk menghindari ombak besar tersebut.



Nampak masih terlihat sedimen pada badan sungai. Ternyata belum semua sedimen terangkat pada program pengerukan sungai Bau-Bau

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007

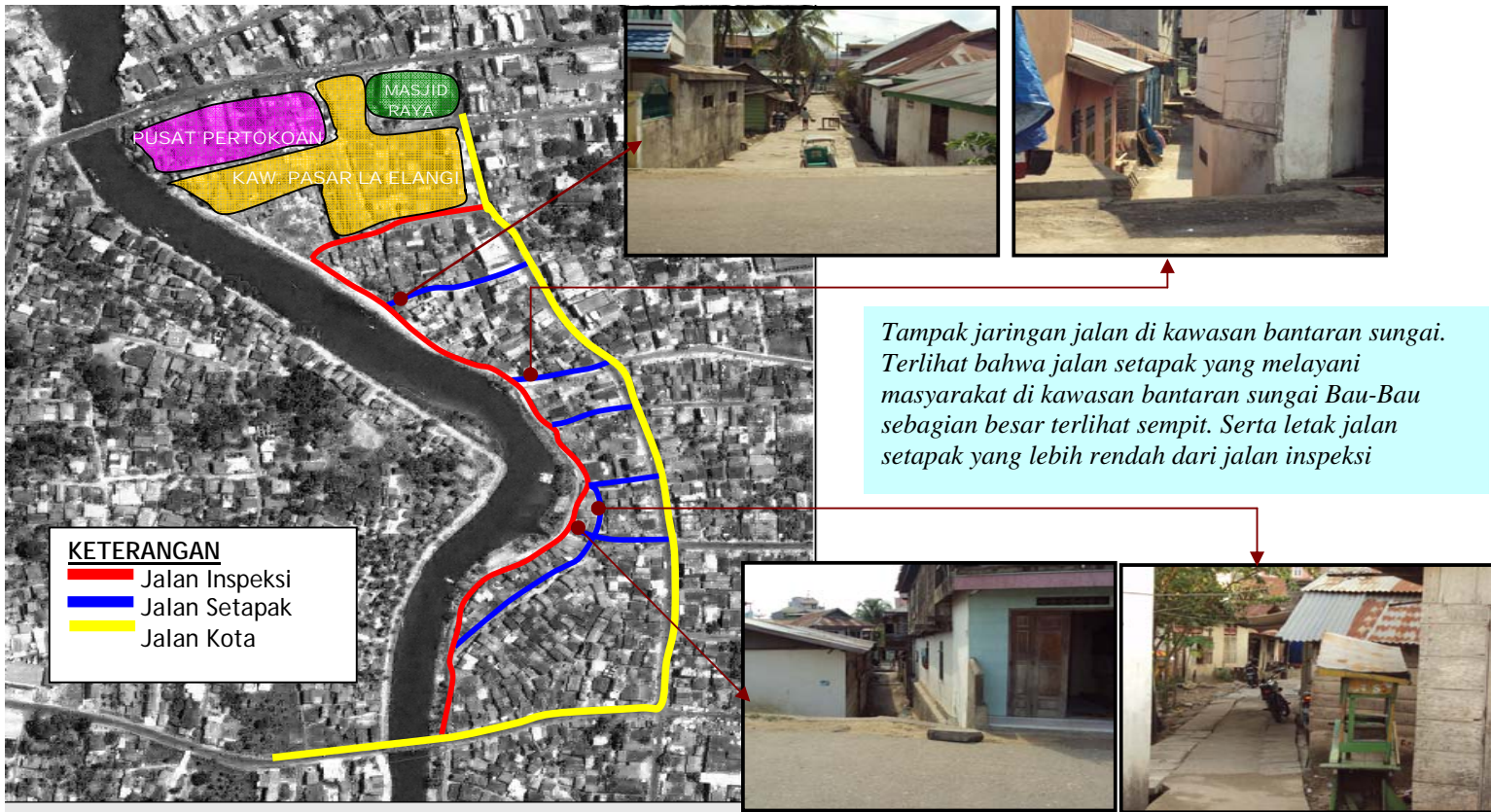
GAMBAR 4.5 MASIH TERDAPAT SEDIMEN DI BADAN SUNGAI

4.2.2 Peningkatan Jalan Inspeksi

Jalan inspeksi yang ada dibantaran sungai Bau-Bau sebelum ditingkatkan mempunyai lebar 3 meter. Namun pada beberapa titik sudah mengalami penyempitan sehingga lebarnya kurang dari 3 meter. Jalan inspeksi yang ada juga tidak mempunyai akses ke jalan utama, sehingga terkesan menjadi jalan buntu. Kendaraan roda empat tidak dapat memanfaatkan jalan tersebut karena tidak mempunyai akses keluar. Padahal disekitar kawasan bantaran sungai tersebut terdapat pasar La Elangi yang merupakan salah satu pasar tersibuk di Kota Bau-Bau. Untuk itu pada tahun 2007, Pemerintah Kota Bau-Bau berencana melebarkan jalan yang ada dan menghubungkan akses jalan tersebut dengan kawasan pasar sehingga aksesibilitas masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai, khususnya di Kelurahan Tomba dan Bataraguru menjadi lebih lancar.

Setelah terbangunnya jalan inspeksi tersebut dengan lebar 6 meter dan teraksesnya jalan tersebut dengan kawasan pasar La Elangi, maka ada peningkatan pemakaian jalan tersebut oleh masyarakat. Jalan inspeksi yang dulunya jarang dilalui bahkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan tersebut, kini telah banyak dimanfaatkan tidak saja oleh masyarakat sekitar tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal diluar kawasan. Bahkan jalan setapak yang dulunya tidak terakses ke jalan inspeksi karena letaknya yang lebih rendah, kini sudah mulai terakses dengan cara dibuatkan tangga diujung jalan setapak tersebut yang terakses ke jalan inspeksi.

Dari hasil identifikasi kegiatan penataan bantaran sungai dapat disimpulkan bahwa program pengerukan Sungai Bau-Bau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dari tahun 2006 hingga tahun 2007 telah meningkatkan kualitas air sungai menjadi lebih bersih. Sungai yang kotor akibat buangan sampah masyarakat, kini sudah terlihat bersih. Namun kegiatan pengerukan tersebut belum sempurna karena pada beberapa titik masih terlihat adanya sedimentasi yang belum terangkat. Untuk itu, program pengerukan Sungai Bau-Bau sebaiknya tetap dilanjutkan. Sedangkan untuk program peningkatan jalan inspeksi yang dilaksanakan pada tahun 2007, telah membuat mobilitas masyarakat dan kendaraan beroda empat menjadi lebih mudah dan lancar. Aktivitas masyarakat pada kawasan tersebut meningkat, apalagi dengan teraksesnya jalan inspeksi dengan kawasan sekitar. Hingga saat ini akses jalan inspeksi tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai saja tetapi juga masyarakat yang berada diluar daerah tersebut.



Sumber : Quickbird Kota Bau-Bau dan Dokumentasi Peneliti, diolah, 2010

GAMBAR 4.6
JARINGAN JALAN DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI BAU-BAU

4.3 Identifikasi dan Analisis Perubahan Pola Hunian Sesudah Penataan

Identifikasi dan analisis perubahan pola hunian sesudah adanya penataan dilakukan untuk melihat perubahan bentuk fisik rumah dan arah hadap rumah terhadap sungai serta fungsi rumah. Analisis fisik rumah yaitu dengan melihat tujuan masyarakat dalam memperbaiki rumahnya setelah adanya penataan ini. Sedangkan analisis pola hadap rumah terhadap sungai dilakukan dengan cara membandingkan pola hadap rumah sebelum penataan dan sesudah penataan. Analisis fungsi rumah dilakukan dengan cara melihat apakah ada penambahan fungsi rumah setelah adanya penataan ini. Semua analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penataan bantaran sungai Bau-Bau terhadap kondisi fisik rumah masyarakat.

4.3.1. Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Perumahan yang ada di kawasan bantaran sungai Bau-Bau termasuk perumahan yang padat penduduk. Pemanfaatan lahan masyarakat untuk membangun sangat tinggi, sehingga hampir semua lahan yang dimilikinya digunakan untuk membangun rumah. Hal ini bukan karena tingginya tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri, akan tetapi lebih pada kebutuhan akan hunian akibat bertambahnya jumlah penduduk. Akibatnya sarana dan prasarana pada kawasan tersebut tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan perumahan karena keterbatasan lahan.

Berikut ini adalah tabel status kepemilikan lahan dan bangunan masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai Bau-Bau:

TABEL IV.8
STATUS KEPEMILIKAN LAHAN DAN BANGUNAN

NOMOR	STATUS KEPEMILIKAN	JUMLAH	PERSEN
1	Hak milik	48	73,8
2	Kontrak Tahunan	1	1,5
3	Sewa Bulanan	6	9,2
4	Lainnya	10	15,4
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa 73,8% status kepemilikan lahan dan bangunan pada kawasan tersebut merupakan hak milik. Sedangkan status lainnya yang mencapai 15,4% berada pada posisi kedua. Status lainnya dalam kepemilikan lahan dan bangunan berdasarkan hasil kuesioner adalah adanya masyarakat yang masih tinggal dengan orang tua atau mertuanya dalam satu rumah. Pada posisi ketiga adalah status kontrak bulanan yang mencapai 9,2%. Selanjutnya posisi terakhir adalah status rumah dengan kontrak tahunan yang hanya mencapai persentase 1,5%. Melihat prosentase yang ada dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah merupakan warga yang memang menetap dikawasan bantaran sungai dan hanya sedikit saja warga yang tinggal sementara.

4.3.2. Analisis Terhadap Arah Hadap

Seperti pada umumnya, kebanyakan perumahan masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai terkesan kumuh dan jorok, maka rumah masyarakat yang ada disekitar kawasan bantaran sungai Bau-Bau juga tidak jauh-jauh dari kesan itu. Bantaran sungainya kotor, karena dijadikan tempat buangan sampah dan berak. Hal itulah yang membuat masyarakat enggan untuk menjadikan sungai sebagai halaman depan rumahnya.

Untuk itu diperlukan penanganan oleh pemerintah untuk menata kawasan yang ada disekitar bantaran sungai sehingga tidak lagi terkesan sebagai kawasan yang jorok. Penataan lingkungan yang baik, tentu akan mendorong masyarakat termotivasi untuk memperbaiki huniannya. Sehingga masyarakat yang tadinya enggan menjadikan sungai sebagai halaman depan rumahnya menjadi berkeinginan, sehingga misi pemerintah daerah yang menjadikan sungai atau pantai menjadi halaman depan yang indah (*waterfront city*) bisa tercapai.

Posisi arah hadap rumah terhadap sungai sebelum adanya penataan bantaran Sungai Bau-Bau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.9
ARAH HADAP RUMAH RESPONDEN TERHADAP
SUNGAI SEBELUM ADANYA PENATAAN

NO	ARAH HADAP TERHADAP SUNGAI	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Menghadap Sungai	32	49,2
2	Membelakangi Sungai	16	24,6
3	Sejajar Sungai	16	24,6
4	Lainnya	1	1,5
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Sedangkan arah hadap rumah terhadap sungai setelah adanya penataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.10
ARAH HADAP RUMAH REPONDEN TERHADAP
SUNGAISETELAH ADANYA PENATAAN

NO	ARAH HADAP TERHADAP SUNGAI	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Menghadap Sungai	37	56,9
2	Membelakangi Sungai	13	20,0
3	Sejajar Sungai	14	21,5
4	Lainnya	1	1,5
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 dapat dilihat adanya perubahan arah hadap rumah setelah adanya penataan. Sebelum adanya penataan rumah yang menghadap sungai sebanyak 49,2% setelah adanya penataan rumah yang menghadap sungai menjadi 56,9% atau naik sebanyak 7,7%. Disini, peneliti melihat adanya respon yang positif dari masyarakat terhadap program penataan, sehingga secara sadar menyesuaikan arah hadap rumah terhadap sungai. Sedangkan untuk arah hadap rumah terhadap sungai yang lain, seperti rumah yang membelakangi sungai sebanyak 20,0%, rumah yang sejajar sungai 21,5% dan jawaban lain-lain sebanyak 1,5 %, tidak dapat diartikan bahwa terdapat 43,1% rumah-rumah yang berada di tepi bantaran sungai tidak menghadap kesungai. Hal ini karena target penyebaran kuesioner tersebut tidak hanya pada rumah-rumah yang berada ditepi sungai saja

tetapi juga rumah pada baris kedua yang tidak mendapatkan akses langsung jalan inspeksi, tetapi menghadap jalan setapak. Dari hasil observasi peneliti hampir semua rumah masyarakat yang berada di samping jalan inspeksi di bantaran sungai sudah menghadap ke sungai.



Sumber: Foto Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.7
KEADAAN PERUMAHAN MASYARAKAT SETELAH PENATAAN

Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap arah hadap rumah terhadap sungai, maka diajukan pertanyaan dalam kuesioner “Menurut Bapak/Ibu rumah-rumah yang berada didekat sungai seharusnya menghadap kemana?”. Jawaban masyarakat atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

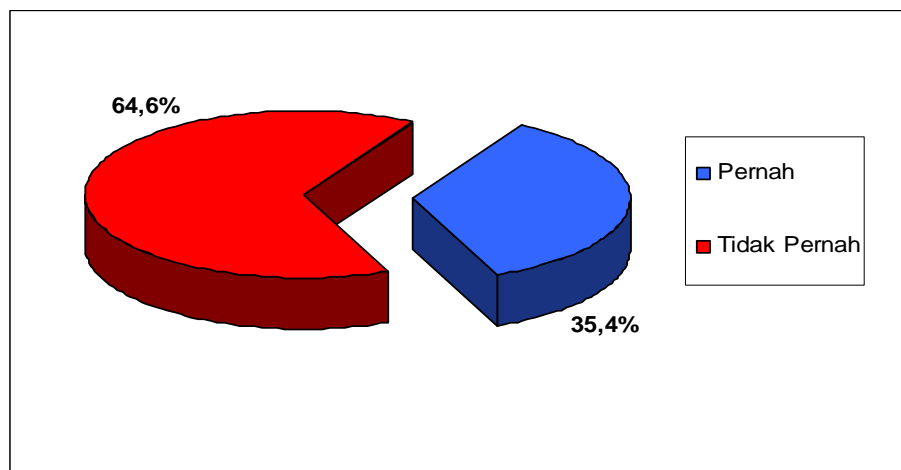
TABEL IV.11
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG ARAH HADAP RUMAH TERHADAP SUNGAI

NOMOR	PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG ARAH HADAP RUMAH TERHADAP SUNGAI	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Menghadap sungai	50	76,9
2	Memberlakangi sungai	4	6,2
3	Sejajar sungai	4	6,2
4	Lainnya	7	10,8
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

4.3.2 Analisis Terhadap Perubahan Fisik Rumah

Dalam pembahasan ini ingin dilihat bagaimana perubahan fisik rumah setelah adanya penataan. Untuk pertanyaan pernahkah bapak/ibu memperbaiki rumah setelah adanya penataan, terdapat 23 jawaban atau 35,4% yang mengatakan pernah dan 42 jawaban atau 64,6 % yang mengatakan tidak pernah.



GAMBAR 4.8
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERNAH/TIDAKNYA
MEMPERBAIKI RUMAH SETELAH ADANYA PENATAAN

Dari yang mengatakan pernah memperbaiki rumah setelah adanya penataan, peneliti bermaksud mengetahui jenis perbaikan apa saja yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat jenis perbaikan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut:

TABEL IV.12
JENIS PERBAIKAN TERHADAP RUMAH
SETELAH ADANYA PENATAAN

NOMOR	JENIS PERBAIKAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Menambah Luas Rumah/Ruangan	8	34,8
2	Perbaikan Ruang Tamu Saja	7	30,4
3	Perbaikan/Membuat WC	1	4,3
4	Lainnya	7	30,4
	JUMLAH	23	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis perbaikan yang mempunyai prosentase paling besar berdasarkan jawaban responden adalah jenis perbaikan menambah luas rumah/ruangan dengan prosentase sebesar 34,8%, disusul jenis perbaikan ruang tamu saja dan jenis perbaikan lainnya dengan prosentase sebesar 30,4%. Jenis perbaikan lainnya yang dimaksud oleh responden adalah membuat teras rumah, membuat tangga dari jalan ke rumah dan mengganti atap yang rusak. Sedangkan perbaikan/membuat WC adalah prosentase perbaikan terkecil yang dipilih oleh responden dengan prosentase sebesar 4,3%.

Apakah perbaikan rumah tersebut dipengaruhi oleh program penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti memberikan pertanyaan lanjutan kepada responden yaitu alasan yang mendasari masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Dari 23 responden yang pernah melakukan perbaikan rumah setelah adanya penataan tersebut, ada bermacam alasan yang mendasarinya. Untuk mengetahui alasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.13
ALASAN RESPONDEN MEMPERBAIKI
RUMAH SETELAH ADANYA PENATAAN

NOMOR	ALASAN MEMPERBAIKI RUMAH	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Pemeliharaan Rutin Saja	5	21,7
2	Menyesuaikan Dengan Penataan	12	52,2
3	Tidak Ada Hubungannya Dengan Penataan	6	26,1
	JUMLAH	23	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari 23 orang responden yang menyatakan pernah memperbaiki rumah setelah adanya penataan, maka 52,2% responden menyatakan bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penataan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan 26,1% responden menyatakan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan penataan. Sisanya, 21,7% responden menyatakan bahwa perbaikan yang dilakukan hanya merupakan pemeliharaan rutin saja.



Rumah masyarakat sebelum penataan bantaran sungai. Gambar diambil pada tanggal 13 Mei 2007

Rumah masyarakat setelah penataan bantaran sungai. Gambar diambil pada Bulan November 2009

Sumber : Foto Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.9 **KEADAAN PERUMAHAN MASYARAKAT** **SEBELUM DAN SETELAH PENATAAN**

Kalau melihat kemampuan masyarakat dalam membangun rumah, tentu tidak terlepas dari tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Makin besar tingkat pendapatannya maka semakin besar pula kemampuannya menyisihkan pendapatan untuk membangun/memperbaiki rumahnya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tersebut mempunyai pendapatan maksimal satu juta rupiah. Hal ini tentu akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi mereka. Adapun kemampuan masyarakat dalam memperbaiki rumahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.14
KEMAMPUAN MASYARAKAT MEMPERBAIKI RUMAH

NOMOR	KEMAMPUAN MEMPERBAIKI RUMAH	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Tidak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun sulit	18	27,7
2	Tidak, Hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	26	40,0
3	Dapat, untuk perbaikan ringan saja	17	26,2
4	Dapat, Untuk perbaikan sedang saja	4	6,2
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kemampuan dalam menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki rumah. Sejumlah 67,7% dari responden diatas merasa bahwa pendapatannya tidak dapat disisihkan untuk perbaikan rumah. Bahkan dari prosentase tersebut, 27,7% responden merasa bahwa pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 26,2% dari responden masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki rumahnya walaupun hanya perbaikan ringan saja (perbaikan yang membutuhkan anggaran kurang dari Rp. 2 juta). Untuk masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih, sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan perbaikan sedang terhadap rumahnya (perbaikan yang membutuhkan anggaran antara Rp. 2 juta hingga Rp. 10 juta) berada pada tempat terendah dengan nilai prosentase sebesar 6,2% saja.

Rendahnya kemampuan masyarakat tersebut tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak juga menjadi terbatas. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai tersebut bekerja pada sektor informal, terutama sebagai pengusaha dan wiraswasta. Namun kebanyakan merupakan kegiatan usaha kecil. Untuk itu diperlukan intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengangkat derajat ekonominya sehingga lebih meningkat.

4.3.3. Analisis Terhadap Perubahan Fungsi Rumah

Penataan Bantaran sungai yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama yang tinggal disekitar bantaran sungai tersebut. Disamping melihat perubahan terhadap fisik rumah, peneliti juga ingin melihat apakah ada perubahan terhadap fungsi rumah setelah adanya penataan ini. Perubahan fungsi yang dimaksud adalah adanya penambahan fungsi rumah yang selama ini hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, namun setelah adanya penataan ini fungsinya menjadi bertambah, misalnya disamping sebagai tempat tinggal juga dipergunakan untuk jualan.

TABEL IV.15
ADANYA TAMBAHAN FUNGSI RUMAH
SETELAH PENATAAN

NOMOR	PERUBAHAN FUNGSI RUMAH	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Sebagai tempat jualan	9	13,8
2	Sebagian ruangan dikontrakkan	3	4,6
3	Lainnya	10	15,4
4	Tidak ada yang berubah	43	66,2
JUMLAH		65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 66,2% responden menyatakan tidak mengalami perubahan fungsi rumah setelah adanya penataan. Sedangkan 15,4% persen responden memilih lainnya. Responden yang menyatakan telah terjadi penambahan fungsi rumah setelah adanya penataan ini ada sebanyak 18,4%, yang terdiri dari 13,8% responden menyatakan terjadi penambahan fungsi rumah sebagai tempat jualan dan 4,6% responden menyatakan terjadi penambahan fungsi rumah dengan cara mengontrakkan sebagian ruangan yang ada.



Ruko yang dibangun setelah adanya penataan. Telah adanya perubahan orientasi dalam membangun rumah, tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat berusaha

Sumber : Foto Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.10
RUMAH TOKO YANG DIBANGUN SETELAH
ADANYA PENATAAN BANTARAN SUNGAI

Kesimpulan yang didapat dari analisis fisik rumah dengan membandingkan kondisi rumah sebelum dan sesudah penataan adalah telah ada perubahan orientasi arah hadap rumah setelah penataan bantaran sungai Bau-Bau dengan menjadikan sungai sebagai bagian depan rumahnya walaupun prosentasenya tidak besar. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Juga telah ada perubahan atau penambahan fungsi rumah yang tidak dipandang sebagai tempat tinggal semata tetapi dapat difungsikan sebagai tempat usaha. Adanya akses jalan yang memadai sehingga membuat intensitas pergerakan masyarakat dikawasan tersebut menjadi lebih tinggi adalah salah satu faktor pendukung perubahan fungsi rumah tersebut.

4.4 Analisis Aktifitas Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penataan

Aktifitas masyarakat yang akan dianalisis adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah dan lokasi buangan limbah MCK. Akan dilakukan perbandingan aktivitas masyarakat sebelum penataan dan sesudah penataan bantaran sungai Bau-Bau. Disamping itu juga akan dianalisis pemanfaatan area penataan tersebut oleh masyarakat.

4.4.1 Kebiasaan Membuang Sampah

Untuk mengetahui kebiasaan membuang sampah masyarakat sebelum adanya penataan bantaran sungai Bau-Bau, maka peneliti mengajukan pertanyaan dalam kuesioner yaitu : " Sebelum penataan dimanakah lokasi/tempat pembuangan sampah rumah tangga bapak/ibu?". Jawaban masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.16
LOKASI BUANG SAMPAH MASYARAKAT
SEBELUM PENATAAN

NOMOR	LOKASI BUANG SAMPAH	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ke Badan Sungai	29	44,6
2	Halaman Rumah	9	13,8
3	TPS	27	41,5
4	Lainnya	0	0,0
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 44,6% responden membuang sampahnya ke badan sungai. Sedangkan ada 41,5% responden yang membuang sampah ke TPS yang disediakan pemerintah. Sisanya sebesar 13,8% masyarakat membuang sampahnya di halaman rumah lalu dibakar atau ditimbun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat menjadikan badan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas air sungai dan mempercepat sedimentasi.

Sedangkan untuk melihat apakah ada perubahan dalam hal membuang sampah setelah adanya penataan bantaran sungai, maka peneliti mengajukan pertanyaan :”Dimanakah Lokasi/Tempat pembuangan sampah bapak/ibu saat ini?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.17
LOKASI BUANG SAMPAH MASYARAKAT
SETELAH PENATAAN

NOMOR	LOKASI BUANG SAMPAH	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ke Badan Sungai	4	6,2
2	Halaman Rumah	4	6,2
3	TPS	40	61,5
4	Lainnya	17	26,2
	JUMLAH	65	100

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lokasi buang sampah masyarakat yang tertinggi setelah adanya penataan adalah di TPS yang disediakan pemerintah yaitu sebesar 61,5%. Terbesar kedua lokasi buang sampah adalah lainnya sebesar 26,2%. Masyarakat yang memilih jawaban lainnya dalam penjelasannya mengatakan bahwa sampah yang dihasilkan dikumpul didalam kantong/karung, setelah penuh baru diletakkan dipinggir jalan untuk diangkut oleh mobil sampah. Alasan mereka tidak membuang langsung ke TPS yang ada, karena lokasi TPS agak jauh dari tempat tinggal mereka. Sedangkan masyarakat yang memilih untuk membuang sampahnya dibadan sungai mempunyai prosentase yang sama dengan masyarakat yng membuang sampahnya di halaman rumahnya yaitu sebesar 6,2%.

Membandingkan kedua tabel diatas, dapat dilihat adanya perubahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangganya. Sebelum penataan banyak masyarakat yang selama ini membuang sampah rumah tangganya ke badan sungai (44,6%), setelah adanya penataan menjadi berkurang menjadi tinggal 6,2%. Artinya terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 38,4%. Namun demikian, masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai tetap menjadi sebuah masalah, karena sungai bukanlah tempat untuk buangan limbah rumah tangga.

Untuk mengetahui adanya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, maka peneliti mengajukan pertanyaan “Adakah tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah dilingkungan bapak/ibu”. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

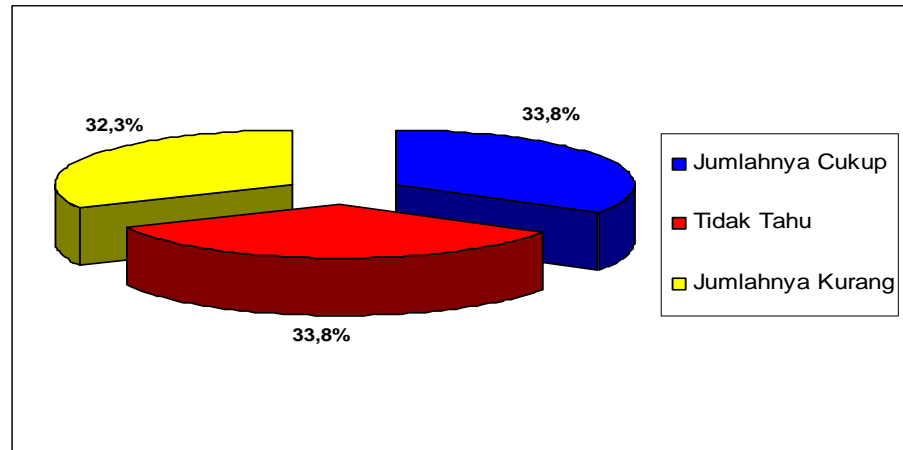
TABEL IV.18
KETERSEDIAAN TPS

NOMOR	KETERSEDIAAN TPS	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ada	59	90,8
2	Tidak Tahu	3	4,6
3	Tidak ada	3	4,6
4	Lainnya	0	0,0
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 90,8% atau sebanyak 59 responden menjawab telah tersedia tempat pembuangan sampah dilingkungan mereka. Sedangkan untuk jawaban tidak tahu dan tidak ada tps di lingkungan mereka mempunyai jumlah yang sama, yaitu sebanyak 4,6% atau sebanyak 3 orang responden. Tidak ada yang memberikan jawaban lainnya pada pertanyaan tersebut.

Hubungannya dengan kecukupan volume buangan sampah masyarakat terhadap jumlah tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Jika terdapat tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah dilingkungan bapak/ibu, apakah jumlahnya cukup?”. Jawaban responden dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.11
KECUKUPAN KETERSEDIAAN TPS

Dari 65 responden yang ada, yang memberikan jawaban bahwa TPS yang disediakan pemerintah jumlahnya cukup dan yang menjawab tidak tahu mempunyai prosentase yang sama yaitu sebesar 33,8% atau sebanyak 22 responden. Sisanya memberikan jawaban jumlah TPS yang disediakan oleh pemerintah jumlahnya kurang dengan prosentase sebesar 32,% atau sebanyak 21 responden.

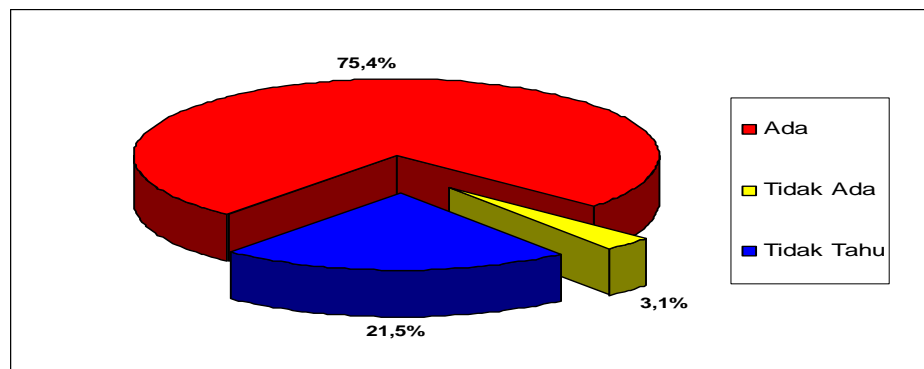
Dari hasil pengamatan di lapangan, masih banyak sampah masyarakat yang berserakan di atas jalan. Hal ini tentu harus diantisipasi, karena jika tidak, maka kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah di sembarang tempat sebelum adanya penataan akan terulang kembali. Dalam komentar singkatnya pada kuesioner, banyak sekali masyarakat yang mengharapkan agar kebersihan bantaran dan daerah aliran sungai setelah adanya penataan ini tetap terjaga dan tidak kotor seperti kondisi sebelum adanya penataan. Keberadaan satu buah kontainer sampah di sekitar bantaran sungai memang sangat kurang untuk melayani kebutuhan sampah masyarakat. Apalagi jika letaknya cukup jauh dari rumah masyarakat. Namun untuk menambah jumlah kontainer sampah juga bukan permasalahan yang mudah karena sulitnya mencari lokasi. Banyak sekali masyarakat yang menolak jika kontainer sampah diletakkan didekat rumah mereka.



Sumber : Foto Dokumentasi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.12
TPS YANG ADA DAN SAMPAH YANG BERSERAKAN

Keberadaan petugas pengangkut sampah yang rutin mengangkut sampah sangat penting dalam menjaga kebersihan suatu wilayah atau kawasan. Untuk mengetahui pendapat masyarakat di kawasan bantaran sungai Bau-Bau tentang adanya pelayanan yang rutin oleh petugas sampah diwilayahnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.13
ADANYA PELAYANAN OLEH PETUGAS SAMPAH

Dari 65 responden yang ditanya apakah ada petugas sampah yang rutin mengangkut sampah dilingkungan mereka, maka 75,4% atau 49 responden menjawab ada. Sedangkan sisanya sebanyak 21,5% atau 14 responden menjawab tidak tahu dan 3,1% atau 2 responden menjawab tidak ada.

4.4.2 Buangan Limbah Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

Buangan air limbah dari MCK turut berpengaruh terhadap kebersihan kawasan bantaran sungai. Untuk melihat bagaimana buangan limbah masyarakat sebelum adanya penataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.19
BUANGAN AIR LIMBAH MCK MASYARAKAT
SEBELUM ADANYA PENATAAN

NOMOR	BUANGAN AIR LIMBAH MCK	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ke Badan Sungai	19	29,2
2	Bak Peresapan di Halaman Rumah	11	16,9
3	Ke Saluran Drainase	26	40,0
4	Lainnya	9	13,8
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 40% dari masyarakat membuang air limbah MCK di saluran drainase. Terdapat 29,2% masyarakat membuang air limbah MCK-nya badan sungai. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 16,9% masyarakat membuang ke bak peresapan di halaman rumah dan yang yang menjawab lainnya sebesar 13,8%.

Sedangkan untuk melihat bagaimana buangan air limbah dari mandi, cuci dan kakus masyarakat setelah adanya penataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.20
TABEL PENGELOMPOKAN RESPONDEN
MENURUT BUANGAN AIR LIMBAH MCK
SETELAH ADANYA PENATAAN

NOMOR	BUANGAN AIR LIMBAH MCK	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Ke Badan Sungai	8	12,3
2	Bak Peresapan di Halaman Rumah	14	21,5
3	Ke Saluran Drainase	33	50,8
4	Lainnya	10	15,4
	JUMLAH	65	100,0

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 50,8% dari responden yang membuang air limbah mck ke saluran drainase, 21,5% membuang air limbahnya ke bak peresapan dihalaman rumah. Sedangkan terdapat 15,4% yang menjawab lainnya dan 12,3% yang membuang air limbah mck ke badan sungai. Masyarakat yang menjawab lainnya, dalam penjelasannya mengatakan bahwa air limbah buangan untuk mandi dan mencuci dibuang ke saluran drainase sedangkan air limbah untuk kakus dibuang ke bak peresapan yang dibuat di halaman atau di dalam rumah.

Membandingkan kedua tabel diatas, dapat dilihat adanya perubahan buangan air limbah masyarakat sebelum dan sesudah adanya penataan. Masyarakat yang sebelum adanya penataan membuang air limbahnya langsung ke badan sungai sebesar 29,2%, setelah adanya penataan turun hanya menjadi 12,3% saja, turun sebesar 16,9%. Sedangkan masyarakat yang membuang air limbahnya ke bak peresapan yang dibuat di halaman rumah naik dari 16,9% sebelum penataan menjadi 21,5% setelah adanya penataan, yang artinya naik sebesar 4,6%. Dari hasil observasi peneliti di lapangan, memang masih ada masyarakat yang memasang pipa yang tertanam didalam tanah dan melintang dibadan jalan hingga ke sungai sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangganya, namun sudah tidak lagi terlihat kotoran manusia di saluran pembuangannya. Bantaran sungai yang dulunya banyak dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk buang air besar, dengan adanya penataan ini sudah tidak terlihat lagi.



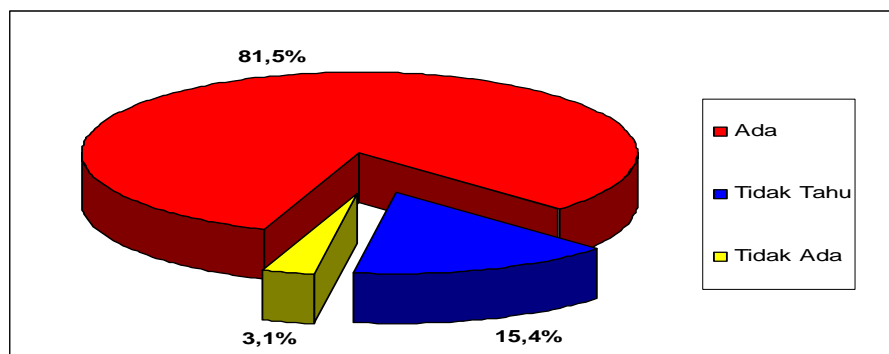
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2007

GAMBAR 4.14
SEBELUM ADANYA PENATAAN BANTARAN SUNGAI
DIJADIKAN TEMPAT BUANG TINJA MASYARAKAT

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sebelum adanya penataan ini, banyak masyarakat yang membuang hajat dibantaran sungai. Ada beberapa masyarakat yang mempunyai komentar yang hampir sama dalam kuesioner yang mengatakan semoga tidak ada lagi yang buang sampah dan berak ditanggul. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengalaman masyarakat yang merasakan bagaimana kondisi bantaran sungai sebelum adanya penataan ini.

4.4.3 Pemanfaatan Area Penataan Oleh Masyarakat

Sebelum adanya penataan daerah bantaran sungai tersebut jarang sekali digunakan untuk aktivitas masyarakat, baik dalam interaksi sosialnya maupun untuk kegiatan lainnya. Namun setelah adanya kegiatan penataan ini, banyak sekali masyarakat pada kawasan tersebut yang menggunakannya untuk beraktivitas, seperti sekedar berolahraga, bermain bersama keluarga dan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan pada sore hari ada beberapa masyarakat sekitar yang berjualan kue dibantaran sungai tersebut. Untuk mengetahui apakah program penataan ini bermanfaat bagi masyarakat dapat dilihat dari gambar 4.13 dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

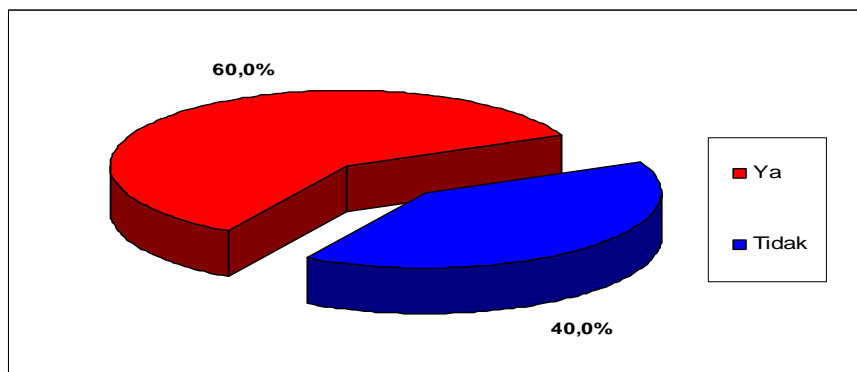
GAMBAR 4.15
DIAGRAM PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP
MANFAAT PROGRAM PENATAAN

Dari Gambar 4.13 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 53 responden atau 81,5% menyatakan bahwa program penataan ini bermanfaat bagi masyarakat dan hanya dua orang responden atau 3,1% saja yang

berpendapat bahwa program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sisanya, sebanyak 10 orang responden atau 15,4% yang memilih jawaban tidak tahu. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat menerima dengan positif program penataan bantaran sungai Bau-Bau.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat di kawasan tersebut yang beraktivitas di kawasan bantaran sungai tersebut, maka peneliti

menanyakan dalam lembar kuesioner pertanyaan “Apakah bapak/ibu sering memanfaatkan area penataan untuk beraktivitas?”. Jawaban masyarakat dapat dilihat pada diagram lingkaran dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.16
DIAGRAM PEMANFAATAN AREA PENATAAN

Dari 65 responden yang ada, 39 responden atau sebesar 60% menyatakan sering memanfaatkan area penataan tersebut untuk beraktivitas. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan kawasan bantaran sungai untuk sekedar berkumpul bersama keluarga, berkumpul dengan para tetangga dan ada juga yang memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga dan berjualan pada sore hari.



Masyarakat sekitar bantaran sungai yang sekedar berkumpul dan bermain bersama tetangga pada sore hari.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2009

GAMBAR 4.17 **AKTIVITAS MASYARAKAT PADA SORE HARI**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam menganalisis aktivitas masyarakat sebelum dan sesudah adanya penataan adalah telah adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dengan tidak memperlakukan sungai sebagai tempat buangan sampah rumah tangga dan buangan limbah MCK. Saat ini, sebagian besar masyarakat telah membuang sampahnya di TPS yang telah disediakan oleh pemerintah, atau mengumpulkan terlebih dahulu sampahnya dan dibuang pada saat mobil sampah lewat didepan rumahnya. Buangan limbah MCK yang dulunya banyak dibuang langsung kesungai saat ini juga sudah berkurang. Masyarakat membuang limbah MCK ke saluran peresapan di halaman rumah atau ke saluran drainase yang ada. Selain itu bantaran sungai yang dulunya sering dijadikan sebagai tempat buang hajat, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Bahkan area penataan tersebut sering dijadikan tempat interaksi sosial masyarakat sekitar, terutama pada sore hari.

4.5 Temuan Penelitian

Menurut Hadi (dalam Yuwono, 2007) mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat buangan barang-barang tidak berguna, tempat berak, termasuk bangkai binatang. Karena itulah maka rumah-rumah penduduk pada umumnya letaknya membelakangi sungai. Pendapat

tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran sungai Bau-Bau sebelum adanya penataan. Perilaku masyarakat dalam memperlakukan sungai sangat buruk. Sungai dijadikan tempat buang sampah limbah rumah tangga. Daerah bantaran sungai yang tidak terawat dan ditumbuhi oleh semak disamping dijadikan tempat buang sampah, juga dijadikan tempat berak oleh masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut. Jalan inspeksi yang ada jarang dilalui oleh masyarakat, terutama yang berada diluar kawasan bantaran sungai karena tidak ada mempunyai akses kekawasan sekitar, apalagi disekitar jalan tersebut banyak buangan sampah oleh masyarakat. Hal ini membuat lingkungan di sekitar bantaran sungai menjadi tidak sehat dan nyaman..

Dalam hal kenyamanan hunian, ada keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat akan membentuk kualitas lingkungan, namun sebaliknya dapat juga terjadi kualitas lingkungan membentuk kualitas masyarakat (Amsyari, 1996:141). Semakin baik kualitas lingkungan maka perilaku masyarakat juga akan cenderung menjadi lebih baik.

Program penataan bantaran Sungai Bau-Bau yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan bantaran sungai sehingga menjadi lebih nyaman sebagai sebuah lingkungan hunian. Tingkat kenyamanan hunian masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Bau-Bau juga menjadi lebih baik. Perubahan kualitas lingkungan juga mendorong masyarakat termotivasi dalam memperbaiki huniannya. Telah ada perubahan pola hadap rumah terhadap sungai. Masyarakat mulai menjadikan sungai sebagai halaman depan rumahnya. Disamping itu, ada upaya masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut untuk memperbaiki rumahnya setelah adanya penataan tersebut. Fungsi rumah yang selama ini hanya dijadikan sebagai tempat tinggal semata, sekarang ini sudah berubah. Rumah, disamping sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berusaha untuk membantu ekonomi keluarga.

Program penataan bantaran sungai juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Perilaku masyarakat yang selama ini

banyak membuang sampah ke bantaran atau ke badan sungai sudah jauh berkurang. Daerah bantaran sungai yang dulunya sering dijadikan sebagai tempat berak masyarakat sekitar, sekarang sudah tidak tampak lagi. Jalan inspeksi yang dulunya jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, saat ini sudah banyak yang memanfaatkan jalan tersebut. Bahkan pada sore hari, daerah bantaran sungai tersebut menjadi tempat interaksi masyarakat sekitar.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan temuan yang ada dilapangan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh penataan bantaran sungai Bau-Bau terhadap pola hunian masyarakatnya, dapat diambil kesimpulan bahwa program penataan bantaran sungai Bau-Bau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan perubahan kualitas lingkungan pada masyarakat yang tinggal disekitarnya menjadi lebih baik. Program ini juga mendapat apresiasi positif dari masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut, karena terdapat 81,5% responden yang menyatakan bahwa program penataan ini bermanfaat bagi mereka.

Secara rinci hasil kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

- a. Telah ada pengaruh penataan bantaran sungai Bau-Bau terhadap perubahan pola hunian masyarakat walaupun prosentasenya tidak besar. Terdapat 18,5% responden yang memperbaiki rumahnya karena adanya penataan ini. Sedangkan perubahan arah hadap rumah dengan menjadikan sungai sebagai bagian depan rumahnya juga telah berdampak positif, walaupun persentasenya juga tidak besar hanya sekitar 7,6% saja. Juga telah ada perubahan fungsi rumah di kawasan bantaran sungai sebesar 18,4%. Kecilnya pengaruh penataan terhadap pola hunian masyarakat tidak terlepas dari rendahnya tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut.
- b. Telah ada pergeseran gaya hidup masyarakat yang tinggal dikawasan bantaran sungai Bau-Bau dari sifat masyarakat pedesaan yang masih erat rasa kebersamaannya menjadi bersifat masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis. Sifat kegotongroyongan masyarakat dalam menjaga dan memelihara 84 an sekitar dan fasilitas umum yang

ada sangat rendah, dimana terdapat 47,7% responden yang menyatakan bahwa sifat kegotongroyongan masyarakat sudah jarang. Hanya sekitar 16,9% responden yang menyatakan bahwa sifat kegotongroyongan masyarakat masih cukup erat.

- c. Telah ada perubahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Sebelum adanya penataan terdapat 44,6% masyarakat yang membuang sampahnya kesungai. Namun setelah penataan, hanya tinggal 6,2% masyarakat yang membuang sampahnya kesungai. Terjadi penurunan yang cukup besar terhadap perilaku membuang sampah kesungai, yaitu sebesar 38,4%.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil analisis dan temuan dilapangan maka diajukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Penataan yang dilaksanakan sebaiknya tidak saja penataan bantaran sungai tetapi juga penataan perumahan yang ada dikawasan tersebut. Untuk masyarakat yang kurang mampu dan menghuni rumah yang tidak layak huni perlu diberikan kemudahan akses dan bantuan bagi mereka sehingga dapat menempati rumah yang layak huni.
- b. Perlu adanya pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dalam meningkatkan keahlian mereka sehingga mampu bekerja sesuai dengan profesi mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.
- c. Program pengerukan sungai Bau-Bau perlu dilanjutkan lagi untuk mengangkat sediment yang masih terlihat di sekitar muara, karena jika tidak dilakukan maka akan mempercepat proses sedimentasi kembali.
- d. Program penataan bantaran sungai sebaiknya tetap dilanjutkan dan diperluas, karena yang tinggal dikawasan bantaran sungai Bau-Bau tidak saja masyarakat yang ada di Kelurahan Tomba dan Bataraguru saja. Hal ini untuk mendukung misi waterfront city yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau.

- e. Untuk menjaga kebersihan kawasan bantaran sungai, perlu diupayakan untuk menambah tempat sampah disekitar bantaran sungai untuk menjaga agar masyarakat tidak membuang sampah ke badan sungai. Disamping itu perlu ada penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, untuk memberikan pandangan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
- f. Dari pengalaman penelitian yang telah dilakukan dan mengingat kekurangan dalam penelitian ini serta untuk menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti dapat menyarankan pada peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema penataan bantaran sungai dan pola hunian masyarakat disekitarnya untuk mengangkat tema mengenai:
 - Pola subsidi perumahan non formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim di kawasan bantaran sungai Bau-Bau
 - Peningkatan kualitas lingkungan berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat di kawasan bantaran sungai Bau-Bau.
 - Penataan hunian masyarakat yang terintegrasi dengan penataan bantaran sungai Bau-Bau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad. 1996. *Membangun Lingkungan Sehat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Budihardjo, Eko. 2009. *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- . 2009. *Perumahan Permukiman di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Dinas Nakertrans Kota Bau-Bau, 2006. *Pendataan Kawasan Kumuh Kota Bau-Bau Tahun 2006*. Bau-Bau: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau.
- Halim, D. Kurniawan. 2008. *Psikologi Lingkungan Perkotaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keman, Soedjadi. 2005. *Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kota Bau-Bau, 2003. *RTRW Kota Bau-Bau Tahun 2003-2012*. Bau-Bau: Pemerintah Kota Bau-Bau.
- Pemerintah Kota Bau-Bau. 2008. *Profil Kelurahan Bataraguru Tahun 2008*. Bau-Bau: Pemerintah Kota Bau-Bau.
- Pemerintah Kota Bau-Bau. 2008. *Profil Kelurahan Tomba 2008*. Bau-Bau: Pemerintah Kota Bau-Bau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 *tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai*.
- Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Sistem Moduler, 2009. *Bahan Ajar Modul 6 Penelitian Perumahan dan Permukiman*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Rahmawati, D.2008. "*Penataan Kawasan dan Pengembangan Potensi Permukiman Nelayan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS)*". Tugas Akhir tidak diterbitkan. Surabaya: Institut Teknologi Surabaya.
- Riduwan, 2008. *Metode dan Teknis Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sastra, Suparno dan Endy Marlina.2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugandhy, A & Hakim, R. 2007. *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafri, 2007. "*Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Penataan Kawasan Sungai Siak Kota Pekanbaru*". Tesis, tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Turner, John, FC. 1972. *Freedom To Build Dweller Control of The Housing Process*. New York.Macmillan Company.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 *Tentang Perumahan dan Permukiman*
- UNDP,1997. *Agenda Permukiman Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Yuwono, P, Budi, dkk (ed). 2003. *Pengelolaan Sungai yang Berkelanjutan*. LPB Publishing.